

LAPORAN HASIL PENELITIAN

JENIS PENELITIAN DASAR

TAHUN ANGGARAN 2015

**PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK ISRAEL TERHADAP
PROSES PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA**



Oleh :

**Masyrofah, S.Ag, M. Si
NIP. 197812302001122002**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)
LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “**PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK ISRAEL TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**MASYROFAH, S.Ag, M.Si**”, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, November 2015

Peneliti,

MASYROFAH, S.Ag, M. Si
NIP. 197812302001122002

Mengetahui,

Kepala Pusat,

Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen)
Masyarakat

LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
jakarta

WAHDI SAYUTI, MA
Ph,d
NIP. 19760422200701 1 012

Kepala Lembaga,

Penelitian dan Pengabdian

LP2M UIN Syarif Hidayatullah

M. ARSKAL SALIM, GP, MA,
NIP. 19700901199603 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyrofah, S.Ag, M.Si
Jabatan : Dosen
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
Alamat : Cleverton Residence Blok. C5 Jl. WR. Supratman Cempaka
Putih
Ciputat Timur Tangerang Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Judul Penelitian “**PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK ISRAEL TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA**” merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan atau/plagiasi maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2015

Yang Menyatakan,

Masyrofah, S.Ag, M.Si
NIP. 197812302001122002

ABSTRAK

Hasil pemilu Israel yang diumumkan Rabu 19 Maret 2015, partai sayap kanan Likud dipimpin Benjamin Netanyahu menangkannya dengan mendapat 30 dari 120 kursi Knesset (parlemen). Netanyahu dengan tegas saat menjelang pemilihan, kemenangan partai Likud akan mengesampingkan upaya negosiasi solusi dua-negara. Ia mengatakan bahwa jika ia kembali memerintah, tidak akan mengizinkan adanya negara Palestina. Pernyataan Netanyahu sebetulnya merupakan pengingkaran terhadap pidatonya 2009 lalu. Saat itu ia menyuarakan dukungan bagi prinsip dua negara untuk dua bangsa (Palestina-Israel). Sementara saingan utama Netanyahu, Isaac Herzog partai kiri-tengah Zionist Union, mengatakan ia mendukung solusi dua-negara dan berjanji menghidupkan kembali perundingan yang terhenti. Zionist Union sebagai partai terbesar kedua saat ini menjadi penyeimbang pemerintahan yang kembali dikuasai partai radikal Likud. Ini menunjukkan kemungkinan pembatasan aktivitas perluasan pembangunan permukiman ilegal dan komitmen untuk solusi dua-negara dan Otoritas Palestina dalam perundingan. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai sejauh mana pengaruh kebijakan politik Israel dibawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu terhadap proses perundingan damai Israel-Palestina, apa saja faktor-faktor terbentuknya kebijakan politik Israel dan bagaimana prospek perdamaian Israel-Palestina pasca Pemilu Israel 2015. Data-data dokumen-dokumen, peraturan dalam bentuk konvensi, traktat dan ratifikasi terkait dengan topik yang dibahas, buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, surat kabar dan situs internet, wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Pakar Hubungan Internasional dan Pengamat/Peneliti Timur Tengah di UIN Jakarta, Universitas Indonesia, LIPI. Menggunakan analisa isi "content analysis" : mengumpulkan data dengan mengkaji bentuk-bentuk kebijakan politik Israel, karakter PM Benjamin Netanyahu dan Partai Likud serta dokumen perundingan damai Israel-Palestina. Fakta berbicara secara terang-terangan PM Benjamin Netanyahu ketika terpilih sebagai PM Israel menegaskan dia tidak akan memuluskan perundingan damai yang bertujuan kemerdekaan Palestina yang semakin banyak mendapat dukungan dari dunia internasional. Dengan terpilihnya kembali PM Benjamin Netanyahu menimbulkan kekhawatiran akan Prospek perundingan damai Israel-Palestina yang tidak berjalan mulus.

Kata Kunci : Kebijakan Politik Israel, Pemilu Israel 2015, Perundingan Damai Israel-Palestina

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji Syukur Kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan izin-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dasar tahun anggaran 2015. Peneliti menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dan bisa menjadi proses pembelajaran untuk meneliti yang lebih baik lagi.

Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, November 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan (Manfaat) Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB. II KAJIAN TEORI DAN LITERATURE REVIEW	
A. Kajian Teori.....	8
B. Literature Review.....	20
Bab III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan waktu penelitian.....	22
B. Setting (latar) Penelitian.....	22
C. Metode Penelitian.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Prosedur Pengolahan Data.....	24
F. Pemeriksaan keabsahan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	25
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	26
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	93
B. Implikasi.....	96

C. Rekomendasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian banyak konflik yang menyangkut suku, bangsa, dan negara di dunia dan yang paling banyak menyita perhatian umat manusia adalah konflik Israel-Palestina. Iyad Hilal menyebutkan bahwa tidak ada persoalan yang memerlukan kajian, diskusi, dan perdebatan panjang seperti layaknya masalah Palestina-Israel.¹

Dalam krisis dunia, hampir setiap masalah bisa dipecahkan, tetapi konflik Israel-Palestina tampaknya sengaja ingin dilanggengkan oleh para pihak berkepentingan. Berbagai cara yang ditempuh untuk mengatasi berbagai krisis di sejumlah belahan dunia lain memang dapat dikatakan mendatangkan hasil yang relatif menggembirakan, tetapi upaya-upaya penyelesaian atas isu Palestina-Israel hasilnya belum signifikan, untuk tidak mengatakan dalam dua tahun belakangan ini justru kembali ke titik nol.

Konflik Palestina-Israel hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Terlebih beberapa waktu terlalu terjadi serangan ke Gaza yang menewaskan ribuan rakyat Palestina. Dunia seakan membisu dan tidak bisa berbuat apa terhadap kebiadaban tentara Israel di Palestina. Tersendatnya proses perdamaian Palestina-Israel rentan dipengaruhi banyak hal, terutama mengenai kebijakan politik pemerintah Israel terhadap proses perdamaian. Nasib hubungan Israel dan Palestina tidak terlepas dari karakter dan kebijakan pemerintahan di Israel, terlebih dengan berhasilnya Netanyahu menjadi perdana menteri untuk ketiga kalinya. Sejak awal menjabat sebagai perdana menteri dengan tegas Netanyahu menyampaikan arah haluan kebijakannya ke depan, terutama mengenai hubungan (perdamaian) dengan Palestina. Dasar-dasar kebijakan Netanyahu inilah yang menjadi batu sandungan sulitnya pemulihan damai yang akan dicapai dengan Palestina.

¹ Iyad Hilal, *Palestina Akar-akar Masalah dan Solusinya*, Bogor : Pustaka Tariqul Izza, 2000, h. 1-8

Koalisi pemerintahan yang didominasi partai-partai ultranasionalis kanan dan ortodoks, kecuali Partai Buruh semakin melancarkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan secara sepihak bagi Israel. Sekalipun Netanyahu menyetujui gagasan perundingan langsung yang diusung oleh Amerika Serikat, di lain sisi ia menutup peluang untuk direalisasikannya inti dari perundingan langsung tersebut, yaitu mengenai *two state solution*, di mana Israel dan Palestina berdiri sebagai dua negara dalam satu wilayah yang sama, yaitu Palestina. Mengenai status Yerusalem pun Netanyahu bersikeras tidak akan pernah membagi wilayah tersebut dengan Palestina. Kebijakan krusial Netanyahu lainnya yang mengancam pemulihan damai dengan Palestina adalah ekspansi pemukiman Yahudi di teritori legal milik Palestina. Secara signifikan, perlahan tapi pasti Israel menggerus identitas masyarakat Palestina dengan kolonisasi para pemukim Yahudi. Mahmoud Abbas, sebagai presiden Otoritas Palestina yang menginginkan perundingan damai menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan apabila Israel belum memberikan konsesi yang adil bagi Palestina. Akibat kebijakan pemerintahan Netanyahu yang mendominasi tersebut.

Hasil pemilu Israel yang diumumkan pada Rabu 19 Maret 2015, partai sayap kanan Likud dipimpin Benjamin Netanyahu memenangkannya dengan mendapat 30 dari 120 kursi Knesset (parlemen). Netanyahu dengan tegas saat menjelang pemilihan, kemenangan partai Likud akan mengesampingkan upaya negosiasi solusi dua-negara. Ia mengatakan bahwa jika ia kembali memerintah, tidak akan mengizinkan adanya negara Palestina. Pernyataan Netanyahu sebetulnya merupakan pengingkaran terhadap pidatonya 2009 lalu. Saat itu ia menyuarakan dukungan bagi prinsip dua negara untuk dua bangsa (Palestina-Israel).

Sementara saingan utama Netanyahu, Isaac Herzog partai kiri-tengah Zionist Union, mengatakan ia mendukung solusi dua-negara dan berjanji menghidupkan kembali perundingan yang terhenti. Zionist Union sebagai partai terbesar kedua saat ini menjadi penyeimbang pemerintahan yang kembali dikuasai partai radikal Likud. Ini menunjukkan kemungkinan pembatasan aktivitas

perluasan pembangunan permukiman ilegal dan komitmen untuk solusi dua-negara dan Otoritas Palestina dalam perundingan.

Isu-isu utama yang dikhawatirkan para pengamat adalah kembalinya diskriminasi terhadap non- Yahudi di hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, permukiman (terutama di Negev), undang-undang rasis, dan isu-isu lain. Sementara Gerakan Perlawanan Hamas menegaskan, pihaknya tidak membedakan antar partai-partai Israel dan menolak bergantung pada hasil pemilunya. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam hasil pemilu Israel dengan menyatakan kemenangan Netanyahu dapat menghancurkan peluang perdamaian.

Hanan Ashrawi, Anggota Komite Eksekutif PLO mengatakan, hasil pemilu Israel merupakan hasil alami dari kebijakan Netanyahu yang mengakibatkan adanya rasa takut, permusuhan, dan ketidakpercayaan. Menurutnya, Netanyahu harus bertanggung jawab atas kebijakannya yang telah meningkatkan aksi ekstrimisme di seluruh wilayah Palestina. Kepala Perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan, Palestina akan meningkatkan upaya internasional guna mengadukan berbagai pelanggaran Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina walau Netanyahu akan terus memimpin.

Erekat menyatakan, Palestina akan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag dan akan mengintensifkan semua upaya diplomatik untuk tercapainya pendirian negara Palestina merdeka. Hasil pemilu menunjukkan keberhasilan kampanye Netanyahu dengan menyebar kebencian dan hasutan, melakukan pembangunan permukiman ilegal, rasisme, apartheid dan pengingkaran HAM yang semuanya itu ditentang masyarakat internasional. Terlepas dari hasil pemilu Israel, masyarakat internasional tentunya harus segera bertindak terhadap pelanggaran-pelanggaran sistematis yang melawan hukum internasional di bawah pimpinan Netanyahu.²

² <http://mirajnews.com/id/artikel/opini/pemilu-Israel-dan-masa-depan-palestina/>, diakses pada 8 April 2015, pukul 1.42.

Mengingat lamanya periode waktu kepemimpinan Benyamin Netanyahu³, tentunya dapat dipastikan kebijakan politiknya memiliki peranan penting dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Walaupun banyak ditentang oleh banyak pihak bahkan oleh warga Israel sendiri, namun Benyamin Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan kepemimpinannya dengan agenda besar yaitu menolak perdamaian dengan Palestina, bahkan menggagalkan kemerdekaan Palestina. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi kelangsungan proses perdamaian yang selama ini terus diupayakan.

Menarik untuk diteliti perkembangan proses perdamaian Palestina dari masa ke masa yang belum mencapai titik akhir yaitu kemerdekaan negara Palestina yang sangat diharapkan tidak hanya oleh rakyat Palestina sendiri, bahkan masyarakat dunia. Namun melihat realita dan fakta yang ada, terkait dinamika kebijakan politik Israel yang lagi-lagi di kuasai oleh Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, rasanya masih harus menempuh perjuangan yang sangat panjang.

B. Identifikasi Masalah

1. Peran perdana menteri dalam melaksanakan kebijakan politik Israel.
2. Perkembangan proses perundingan damai Israel-Palestina pasca Pemilu 2015.
3. Kebijakan politik PM Benyamin Netanyahu setelah terpilih menjadi PM Israel untuk yang ketiga kalinya.
4. Pengaruh kebijakan Politik Israel terhadap prospek perundingan damai Israel-Palestina pasca pemilu 2015.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan damai Israel-Palestina.

³ Lima tahun setelah menjadi anggota parlemen, Netanyahu menjadi calon kandidat Perdana Menteri Israel dan menjabat jadi orang tertinggi di Israel hingga 1999. Pada 31 Maret 2009, setelah 10 tahun sejak menjabat jadi Perdana Menteri, [Benjamin Netanyahu](#) kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Israel, ia tercatat sudah tiga kali menjabat jadi Perdana Menteri Israel, yaitu pada 1993-1999, dan 2009-2015, serta 2015-2020.

6. Kebijakan Partai Likud sebagai sebagai partai pendukung PM Benyamin Netanyahu dan partai pemenang Pemilu Israel 2015.
7. Sikap Presiden Otoritas Palestina Mahmood Abbas mengenai kelanjutan perundingan damai.
8. Perkembangan solusi dua negara (*two state solution*) dalam perundingan damai.
9. Isu-isu yang ikut mempengaruhi upaya perundingan damai Israel-Palestina.
10. Kebijakan luar negeri AS terhadap Israel dan Palestina.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai sejauh mana pengaruh kebijakan politik Israel terhadap proses perdamaian Palestina-Israel sampai pada Pemilu Israel 2015. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai faktor-faktor apa saja yang membentuk kebijakan politik Israel dan bagaimana prospek perdamaian Palestina-Israel Pasca Pemilu Israel 2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan permasalahan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan politik Israel terhadap proses Perdamaian Palestina-Israel sampai pada Pemilu Israel 2015.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kebijakan politik Israel.
3. Bagaimana prospek perdamaian Palestina-Israel Pasca Pemilu Israel 2015.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- Khusus :
 1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan politik Israel terhadap proses Perdamaian Palestina-Israel sampai pada Pemilu Israel 2015.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kebijakan politik Israel.
3. Untuk mengetahui prospek perdamaian Palestina-Israel Pasca Pemilu Israel 2015.

- Umum :

Untuk mendapatkan proposisi teoritis dan paradigma mengenai pengaruh kebijakan politik Israel terhadap proses Perdamaian Palestina-Israel sampai pada Pemilu Israel 2015, serta mengikuti perkembangan proses perdamaian Palestina-Israel berdasarkan aspek politik dan hubungan internasional di Timur Tengah.

F. Kegunaan (Manfaat) Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menelusuri perkembangan proses perdamaian Palestina-Israel dari berbagai aspek yaitu aspek politik, ekonomi bahkan militer, serta pengaruh dari kedua belah pihak yaitu pemerintah Palestina dan Israel yang memiliki peran penting bagi terwujudnya perdamaian.
- b. Kajian ini diharapkan untuk menambah informasi dan referensi serta mencari solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan studi Timur Tengah, khususnya Perjanjian damai konflik Israel-Palestina.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan atau pertimbangan dalam menentukan kebijakan politik Israel yang sangat berpengaruh besar terhadap perdamaian Palestina-Israel.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan (Manfaat) Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

Bab II KAJIAN TEORI DAN LITERATURE REVIEW

- A. Kajian Teori
- B. Literature Review

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Tempat dan waktu penelitian
- B. Setting (latar) Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Prosedur Pengolahan Data
- F. Pemeriksaan keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Data
- B. Pembahasan Hasil Penelitian

Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi
- C. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI DAN LITERATURE REVIEW

A. Kajian Teori

Berdasarkan teori kebijakan luar negeri, Menurut James N Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Sedangkan menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan.

Menurut K. J. Holsti : politik luar negeri adalah

“ foreign policy also incorporates ideas that are planned by policy makers in order to solve a problem or uphold some changes in the environment, which *can be in the forms of policies, attitudes, or actions of another states or states*”.⁴

Politik atau kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri sebuah negara. Menurut para pakar hubungan internasional, misalnya, politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor: kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan internasionalnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebuah negara sebagai respon terhadap usaha perlindungan dan pencapaian kepentingan nasionalnya dan juga refleksi dari arah kebijakan serta perilaku politik sebuah negara terhadap negara lain dan juga politik internasional. Dalam proses pengambilan dan pengaplikasian politik luar negeri terdapat sebuah proses yang sangat panjang dan juga

⁴ Holsti, K. J., *International Politics, A Framework for Analysis*, 4th Edition, London, PrenticeHall, 1983, h.97

kompleks yaitu proses *decision making process*, Proses pembuatan kebijakan ini sendiri tidak serta merta bebas dari pengaruh-pengaruh dari sub-tansi-subtansi politik lain, pengaruh tersebut datang dari dalam (internal) dan luar (eksternal), yang termasuk pengaruh internal adalah individu, grup, birokrasi, dan sistem nasional sedangkan yang termasuk pengaruh eksternal adalah sistem global yang menaungi negara-negara di dunia. Adapun mengenai pengaruh-pengaruh tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini :

- **Individu atau ideosinkretik.** Hal ini berkaitan dengan aktor yang mengeluarkan politik luar negeri suatu negara, apakah itu seorang menteri luar negeri ataukah seorang presiden maupun perdana menteri. Menurut Coulumbis dan Wolfe, variabel ini berkaitan dengan persepsi, image dan karakteristik pribadi si *decision-maker* dalam merumuskan politik luar negeri.
- **Grup,** grup ini dapat dipahami akan adanya kelompok kepentingan atau *interest group* yang ada dalam suatu negara. Secara tidak langsung, interest group ini juga ikut andil dalam memberikan pertimbangan perumusan politik luar negeri. Sebagai contoh di Amerika Serikat banyak sekali terdapat kelompok-kelompok kepentingan, salah satunya adalah Lobi Yahudi. Kelompok kepentingan ini berupaya agar kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh AS tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Yahudi, Israel. Hal ini terbukti bahwa selama ini kebijakan-kebijakan AS di Timur Tengah cenderung pro-Israel.
- **Birokratis,** variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Dalam suatu negara pasti terdapat birokrasi yang secara tidak langsung membantu fungsi pemerintahan, sehingga birokrasi ini cukup berperan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Sebagai contoh adalah di Amerika dibentuk suatu badan mengenai keamanan nasionalnya yang dinamakan *National Security Council* (NSC). NSC ini berperang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai kondisi maupun persepsi keamanan bagi Amerika Serikat. Secara tidak langsung, badan ini memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menyangkut hal keamanan.

- **Sistem nasional**, yang dimaksud dengan sistem nasional adalah keseluruhan *elemen nasional* yang ada pada suatu negara, yang termasuk variabel nasional adalah lingkungan, populasi, moral, sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi., atau dengan kata lain atribut nasional ini sesuai dengan konsepsi Morgenthau mengenai “ *National Power* ” yang dimiliki suatu negara. Adanya *national power* ini setidaknya memberikan suatu fondasi bagi perumusan politik luar negeri suatu negara. Yang terakhir adalah *elemen eksternal* yang berupa sistem global. Sistem global ini dapat dipahami sebagai kondisi tatanan dunia yang ada dalam sistem internasional. Selain itu, aktor-aktor lain seperti negara lain, NGO, teroris, dan lain sebagainya juga ikut dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *decision-making process* dalam politik luar negeri suatu negara. Karena secara tidak langsung politik luar negeri suatu negara juga merupakan respon suatu negara terhadap kondisi lingkungan eksternalnya. Sebagai contoh adalah *containment policy* Amerika Serikat yang ditujukan kepada negara-negara Eropa Barat untuk membendung pengaruh komunisme di wilayah tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai respon atas tindakan Uni Soviet yang telah memasukkan negara-negara Eropa Timur ke dalam pengaruhnya melalui ideologi komunis.⁵

Dalam prakteknya, politik luar negeri tidak dapat digeneralisasi bahwa ada satu faktor merupakan faktor yang dominan. Karena keempat faktor tersebut bersinergi membentuk suatu pemahaman akan keputusan politik luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Politik luar negeri yang dibuat oleh suatu negara, pastinya telah mempertimbangkan kelima faktor tadi sebagai determinannya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kepentingan nasional suatu negara. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, Ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

Pragmatisme adalah suatu paham filsafat yang dipopulerkan oleh Charles S Pierce (1905). Paham ini menetapkan aspek-aspek praktis sebagai parameter benar salahnya suatu

⁵ Coulombis, Theodore A. & Wolfe, James, *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, 3rd Editions, New Jersey, Prentice Hall, 1986, h.129

pemikiran atau konsep. Dapat disimpulkan pragmatisme adalah suatu pandangan yang lebih menekankan aspek praktis ketimbang mempertimbangkan doktrin-doktrin baku yang berasal dari suatu ideologi atau teks-teks keagamaan tertentu.⁶ Sekularisme adalah paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Negara Sekuler adalah negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan bernegara. Agama telah diasingkan dari kehidupan negara dalam berbagai sektornya.⁷

Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah :

PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI	KEBIJAKAN POLITIK ISRAEL BERSIFAT SEKULER DAN PRAGMATIS
<ul style="list-style-type: none"> - Individu atau ideosinkretik. Hal ini berkaitan dengan aktor yang mengeluarkan politik luar negeri suatu negara, apakah itu seorang menteri luar negeri ataukah seorang presiden maupun perdana menteri. - Grup, grup ini dapat dipahami akan adanya kelompok kepentingan atau interest group yang ada dalam suatu negara. - Birokratis, variabel ini menyangkut struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. - Sistem nasional, yang dimaksud dengan sistem nasional adalah keseluruhan elemen nasional yang ada pada suatu negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai negara agama (Yahudi), Israel terbukti menjalankan kebijakan politik pragmatis yang paradoks dengan klaim-klaim keagamaan Yahudi yang sering digunakan oleh elite-elite politik Israel dalam membela kepentingan Israel. - Israel telah dirancang sebagai negara Yahudi, tetapi sejak awal para founding fathers negara Israel telah merancang negara Yahudi sebagai negara demokratis. - Deskripsi dominasi kekuatan politik sekuler sangat diperlukan untuk menganalisis corak kebijakan politik luar negeri Israel, mengingat kondisi politik dalam negeri, khususnya “Persepsi para elite pengambil kebijakan” merupakan salah satu faktor penting penentu kebijakan politik luar negeri suatu negara.

⁶ Adian Husaini, *Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), h., xxxvi

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),h. 33-34

Untuk dapat melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori Peran, apa dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang biasanya manusia akan menjadi apa dan siapa, tergantung pada lingkungan sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya.

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua RT, yang berperan mengatur dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar yaitu negara, ditunjuk seorang presiden dengan peran yang diatur oleh masyarakat sendiri. Jadi dengan kata lain sudah tertulis bahwa seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, dan seterusnya.

Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh "penonton" dan ditegur oleh "sutradara". Contohnya dalam era reformasi ini, bila seorang pemimpin atau presiden yang menyalahi skenario atau perannya maka akan dapat di demo oleh masyarakat.

Kemudian sama halnya dengan kehidupan perpolitikan antar negara atau dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran yang didasarkan pada analisis politik. Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimipinnya (Presiden , Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan formal. Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan. Kebijakan atau policy penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilahlain seperti tujuan(goals), program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, usulan –usulan atau rancangan

besar. Sedangkan pengertian *policy* menurut perserikatan bangsa – bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terinci maupun global. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu baik bersifat militer dan non militer, dengan memproyeksikan program – program.

Dalam memahami adanya teori hubungan antara aktor-aktor dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut “*policy influence system*” atau biasa disebut dengan sistem pengaruh kebijakan. *Policy influence system* negara manapun merupakan serangkaian hubungan timbal balik yang sangat kompleks, antara pengambil kebijakan dengan *policy influencers*-nya. *Policy influencers* sering dianggap vital, karena merupakan sumber dukungan bagi para pembuat kebijakan dalam mengeksekusi kebijakan.

Lebih lanjut dibahas dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics / Pengantar Politik Internasional*, Coplin menganalisis struktur sistem pengaruh kebijakan menjadi empat kategori yang mirip dengan keempat tipe yang dikemukakan oleh Gabriel Almond yaitu elite politik yang meliputi para pejabat terpilih seratai partai, elit administratif, elite kepentingan serta elite komunikasi, sedangkan menurut Coplin:

1. Birokrat (*bureaucratic influencer*). Istilah ini digunakan untuk menunjuk kepada berbagai individu dan serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintahan yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan.
2. Partisan (*partisan influencer*). Influencers ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Kelompok kepentingan (*interest influencer*), Terdiri dari sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama. Kelompok ini

sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapatkan dukungan dari pengambil keputusan. Dalam hal ini sumber yang dimaksud adalah dukungan finansial.

4. Media massa (*mass influencer*), terbentuknya iklim opini atau opini publik, yang di gunakan oleh pembuat kebijakan melalui media massa.⁸

Pada kasus kebijakan politik Israel keempat golongan tersebut ikut andil dalam proses kebijakan politik Israel, namun melihat bahwa dukungan negara AS dan sekutunya kepada Israel ini terlihat pada kebijakan luar negeri AS terhadap kepentingan Israel, maka peneliti lebih menekankan pada golongan yang ketiga, yaitu kepentingan yang mempengaruhi. Hal karena terdiri atas sekelompok orang yang tergabung bersama dengan membawa kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompoknya, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapatkan dukungan dari *policy influencer* atau pengambil keputusan yang lain. Kebanyakan kepentingan ini bersifat ekonomis karena orang-orang sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersifat nonekonomis juga bisa digunakan sebagai dasar bagi tindakan mereka, terutama apabila ada ikatan-ikatan etnis atau geografis di antara mereka. Ini terbukti dengan adanya lobi-lobi Yahudi yang memainkan peran penting agar kepentingan Israel dapat terwujud. Lobi-lobi Yahudi ini tersebar diseluruh penjuru dunia agar memiliki kesamaan tujuan untuk mendukung kebijakan Israel.

Menurut Holsti, untuk menjelaskan dan memahami *output* (kebijakan luar negeri), perlu dikaji mengenai persepsi, kesan, sikap, nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan yang bertanggung jawab untuk memformulasikan sasaran dan tindakan (kondisi aktor pengambil kebijakan). Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi penetapan sasaran, keputusan, dan tindakan, diklasifikasikan sebagai “penetapan situasi” (*definition of situation*). “penetapan situasi” mencakup kondisi eksternal dan domestik, kondisi historis, dan kontemporer yang

⁸ William D. Coplin, *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Terjemahan: M. Marbun), CV. Sinar Baru, Bandung, edisi kedua 2003, hal 82

dianggap relevan oleh para pembuat keputusan terhadap masalah politik luar negeri.⁹

Merujuk kepada rumusan Holsti tersebut, terdapat tiga faktor determinan yang berpengaruh terhadap formulasi pragmatisme politik luar negeri Israel, dapat ditempatkan dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Israel, dengan meletakkan aktor utama pengambil kebijakan politik luar negeri Israel (Perdana Menteri Israel) pada posisi sentral pengambil keputusan. Kedua faktor determinan lainnya, yaitu kondisi politik dalam negeri dan faktor internasional dapat ditempatkan sebagai faktor “penentu situasi” yang mempengaruhi sang aktor utama dalam menentukan kebijakan politik Israel yang pragmatis.

Secara lebih terperinci, Holsti menyebut sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perumusan politik luar negeri suatu negara, yaitu (1). Persepsi pembuat kebijakan terhadap tujuan, fakta, atau keadaan, (2). Sikap pembuat kebijakan terhadap suatu realitas berdasarkan asumsi-asumsi permusuhan atau persahabatan, kepercayaan atau ketidakpercayaan, keyakinan atau kekhawatiran, (3). Nilai pembuat kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan pembenaran terhadap keyakinan yang diambilnya, (4). Keyakinan pembuat kebijakan yang dipandang sebagai dalil yang dipandang benar oleh pembuat kebijakan, sekalipun tidak dapat dibuktikan, (5). Doktrin dan ideologi pembuat kebijakan, (6). Analogi, yakni cara membuat kebijakan dalam mengambil keputusan dengan merujuk kepada fenomena historis yang sejenis.¹⁰

Merumuskan politik luar negeri Israel sebagai sebuah sistem, Brecher menyebut lima komponen yang menentukan suatu kebijakan luar negeri, yaitu (1). Lingkungan operasional (*the operational environment*), (2). Jaringan komunikasi (*the communication network*), (3). Elite pembuat kekuasaan (*the decision making elite*), (4). Lingkungan psikologi dari elite (*the psychological environment of elite*), (5). Proses formulasi dan implementasi (*the process of formulation and implementation*).

⁹ Roger Graudy, *Israel dan Praktek-praktek Zionisme*, (Bandung : Pustaka, 1988), h. 3-4

¹⁰ Don Peretz & Gideon Doron, *The Government and Politics of Israel*, (Colorado : Westview Press, 1997), h. 17-18

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”^[1].

Menurut Morgenthau :

”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Berdasarkan perumusan sejumlah analisis politik luar negeri tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa persepsi, budaya dan ideologi politik, nilai, lingkungan psikologi dari aktor-aktor utama pengambil kebijakan politik luar negeri, akan menentukan hasil atau corak kebijakan luar negeri suatu negara.

Asumsi dasar perspektif ini yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka

berdasarkan kalkulasi rational di dalam kancah politik global.¹¹ Fokus perhatian para penstudi yakni lebih menekankan pada transaksi/interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja. Didalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan. Lovel telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang memengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur system internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam Istilah leadership strategy menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan (walaupun kadangkala cara kekerasan mungkin saja dapat dikombinasikan dengan cara persuasi). Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap kapabilitasnya superior dan strategi negarabangsa lain mendukung. Concordance strategy mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Namun, menyadari bahwa kapabilitasnya relatif lebih rendah daripada negara A, maka para pembuat keputusan negara B akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara menghindari pembuatan kebijakan luar negeri yang dapat menimbulkan konflik dengan negara A, dan negara B akan bertingkah laku selaras dengan inisiatif-inisiatif negara A. Sementara itu, di dalam atmosfir confrontation strategy, negara-bangsa A akan mencoba untuk mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara B, dan memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas kapabilitas negara A. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan negara B terhadap superioritas kapabilitas negara A, maka diharapkan negara B akan mencoba untuk membuat strategi penyesuaian-penyesuaian (*accommodation strategy*) untuk menghindari konflik, meskipun ada kemungkinan di waktu depan negara B akan

¹¹ Lloyd Jensen. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982, hal.5

menerapkan strategi konfrontasi (*confrontation strategy*) ketika kapabilitas negara B meningkat.

Model Pembuatan Keputusan (*The Decision-Making Model*). Menyadari keterbatasan yang dimiliki model strategik/rasional, Richard Snyder dkk mengajukan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks untuk meneliti proses perumusan politik luar negeri. Richard Snyder dkk mengemukakan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.¹² Asumsi dasar perspektif ini yaitu bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.¹³ Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosesur-prosedur kelembagaannya. Analisis- analisis dalam perspektif ini berhubungan dengan struktur dan proses dari pengambilan keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan.

tertentu, sehingga aktivitas analisisnya berada pada pembukaan “kotak hitam (black box) dari perspektif analisis adaptif dan perspektif strategi. Peranan kepemimpinan, persepsi, dan system kepercayaan dari para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka merupakan factor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian melalui perspektif ini juga hirau akan karakteristik situasional ketika proses pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan dibuat dalam suatu situasi tertekan, krisis, dan beresiko. Model ini menyatakan bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision-makers*). Kelebihan model ini yaitu dimensi manusia

¹² Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, hal. 199-205.

¹³Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, hal 7

dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri itu sendiri. Maka itu faktor-faktor paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah:

- motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut)
- arus informasi diantara mereka (jaringan informasi)
- pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
- keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

B. Literature Review

1. Peranan PLO Dalam Proses Perdamaian Israel-Palestina (Studi Tentang Perjanjian Damai Oslo I & II), Thesis Masyrofah pada Program Pascasarjana Politik dan Hubungan Internasional Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2005. Penelitian ini tentang peranan PLO pada Perjanjian Oslo I dan II, faktor-faktor yang mendorong Israel dan Palestina menyetujui hasil kesepakatan Oslo, dan kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi proses perundingan damai tersebut.

2. Pakta Perjanjian Damai Dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Penelitian Individual Masyrofah pada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Penelitian ini mengenai proses perundingan damai dalam konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina, apa saja kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan damai konflik Israel-Palestina pasca kemerdekaan Palestina dan pengaruh negara-Negara Timur Tengah dalam membina hubungan diplomatik dengan Israel dan Palestina.

3. Pelanggaran Israel Terhadap Perjanjian Internasional Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Perjanjian Damai Israel-Palestina 1993-1997), Penelitian Madya Masyrofah pada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Penelitian ini mengenai Bagaimana Bentuk-

bentuk Pelanggaran Israel pada Perjanjian Damai Israel-Palestina kurun waktu 1993-2007 dikaitkan dengan perspektif Hukum Tata Negara Islam, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Israel terhadap Perjanjian Damai Israel-Palestina kurun waktu 1993-2007 dan Bagaimana tindakan pemberian sanksi bagi Israel yang melanggar Perjanjian Damai Israel Palestina kurun waktu 1993-2007.

4. **Konflik Israel-Palestina (Study terhadap Konsep Perdamaian di Timur Tengah)**, Thesis Dina Tsalist Wildana pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Penelitian ini tentang upaya dan hasil yang telah ditempuh Israel-Palestina untuk untuk menyelesaikan Konflik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian peneliti mengumpulkan data di beberapa perpustakaan yaitu perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Perpustakaan CSIS, dan Perpustakaan LIPI.

Penelitian ini berlangsung mulai Mei sampai November 2015 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

NO.	MACAM KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Pengumpulan Data	Minggu II, III dan IV	Mei 2015
2.	Pengolahan dan Analisa Data	Minggu I, II, III dan IV	Juni 2015
3.	Penyusunan Konsep Laporan	Minggu I, II, III dan IV	Juli 2015
4.	Laporan Interim	Minggu I, II, III, dan IV	Agustus 2015
5.	Diskusi Laporan	Minggu I, II, III dan IV	September 2015
6.	Penyerahan Draft Laporan	Minggu II	Oktober 2015
7.	Seminar Hasil Penelitian	Minggu III	Oktober 2015
8.	Laporan Final	Minggu I,II November 2015	Oktober 2015

B. Setting (Latar) Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian peneliti mengumpulkan data di beberapa perpustakaan yaitu perpustakaan utama UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Program Studi

Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Perpustakaan CSIS, dan Perpustakaan LIPI.

Adapun wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Duta Besar Palestina di Jakarta Yang Mulia Fariz Mehdi, Pakar Hubungan Internasional dan Pengamat/Peneliti Timur Tengah di UIN Jakarta Prof.Dr. Masykuri Abdillah, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Indonesia Dr. Hamdan Basyar, M.Si dan Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Bpk. Smith Al Hadar.

C. Metode Penelitian

Sebagai dasar penyusunan penelitian ini agar dapat tercapai apa yang diharapkan. Peneliti mengadakan suatu penelitian untuk mendapatkan data dan penjelasan-penjelasan tentang masalah tersebut di atas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Data sekunder berbentuk dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dalam bentuk konvensi, traktat dan ratifikasi yang terkait dengan topik yang dibahas, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, surat kabar dan situs internet. Untuk menunjang data sekunder maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Duta Besar Palestina di Jakarta, Pakar Hubungan Internasional dan Pengamat/Peneliti Timur Tengah di UIN Jakarta, Universitas Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan *The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan buku-buku, laporan, jurnal, website, koran dan sebagainya. Data yang terkumpul selanjutnya

akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta dan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

E. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. *Tahap pertama* pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. *Tahap kedua*, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. *Tahap ketiga*, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah nara sumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”.

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan

penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*)

3. Kebergantungan (*dependability*)

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

4. Kepastian (*confirmability*)

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa isi "*Content analysis*"Yaitu mengumpulkan data dengan mengkaji segala dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar yang terkait pelaksanaan Pemilu Israel 2015, kebijakan politik Israel terhadap proses perdamaian Israel-Palestina baik pengaruhnya maupun faktor-faktor penyebab terbentuknya kebijakan politik Israel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Politik Luar Negeri Israel

Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, sehari setelah mandat Inggris di Palestina berakhir. Setidaknya pernah ada empat kali perang, yaitu tahun 1948, 1956, 1967, 1973.¹⁴ Sebagai akibat adanya konflik Israel-Palestina setelah Israel berdiri, penduduk Palestina banyak yang terusir. Mereka mengungsi ke berbagai negara. Pengungsian mereka tidak hanya di negara tetangga Palestina saja, tetapi ada juga yang sampai di Amerika dan Jerman. Kemudian munculnya ide *Land of Peace* yaitu pertukaran tanah dengan perdamaian, yang telah disepakati oleh sebagian besar negara. Ide ini sebenarnya cukup adil. Israel mendapat pengakuan negara Arab dan Palestina mendapat wilayah untuk mendirikan negara.¹⁵

Konflik yang terjadi antara Israel-Palestina mempunyai sejarah panjang. Konflik tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun, terutama sejak berdirinya Negara zionis Israel tahun 1948. konflik antara Israel-Palestina pada dasarnya menyangkut dua isu pokok, yaitu masalah hak rakyat Palestina untuk mendirikan Negara di atas tanah airnya sendiri dan bangsa Yahudi merasa berhak untuk memilih negaranya sendiri (Israel) berdasarkan petunjuk kitabnya Taurat dan berkeinginan hidup tentram dan damai dengan tetangga Arabnya.¹⁶

Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terealisasi, karena Israel berdalih bahwa daerah Tepi Barat adalah wilayah Yudea dan Samari “Yang dijanjikan” oleh kitab suci sebagai daerah orang Israel. Untuk merealisasikan usahanya, mereka membangun pemukiman Yahudi. Sedangkan Palestina mengklaim Tepi Barat sungai Yordan dan Jalur Gaza sebagai negara Palestina dan beribukota di Jerusalem.

¹⁴ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan Amerika Serikat-Israel*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 31

¹⁵ Musthafa Abd. Rahman, *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 5

¹⁶ Lihat H.A Chalid Mawardi “*Dimensi Internal Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Perang Suriah*”, dalam Bantarto Bandoro, *Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal*, (Jakarta, CSIS, 1991), h. 17

Ketika Perang Dunia II usai, masalah Israel-Palestina ini dibawa oleh Inggris ke forum PBB pada tanggal 2 April 1947. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB menetapkan keputusan untuk menarik mundur pemerintah mandat Inggris dari wilayah Palestina dengan jangka waktu selambat-lambatnya hingga tanggal 1 Agustus 1948. Majelis Umum PBB juga membagi wilayah Palestina menjadi tiga bagian, yaitu negara Arab, negara Yahudi dan Internasionalisasi wilayah Jerusalem.¹⁷ Kedua ketetapan ini dicantumkan ke dalam Resolusi PBB nomor 181 (II) tanggal 29 November 1947.¹⁸

Keputusan resolusi ini ditolak oleh negara-negara Arab karena mereka merasa berhak atas seluruh wilayah Palestina. Mereka beranggapan bahwa pembagian wilayah sama artinya dengan memberikan lebih dari separuh wilayah Palestina kepada bangsa Yahudi yang pada waktu itu hanya sepertiga penduduk dan hanya memiliki 6,59% tanah. Disamping itu, bangsa Palestina bersikeras bahwa PBB tidak mempunyai hak yang sah untuk merekomendasikan pembagian jika mayoritas penduduk Palestina menentanginya.¹⁹

Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan sepertinya selalu menarik perhatian dunia, tidak saja lantaran agresi Israel ke wilayah Palestina begitu juga sebaliknya serangan balik rakyat Palestina terhadap tentara Israel terus berkecamuk demi mempertahankan harga diri sebuah negara yang ingin merdeka dan berdaulat. Perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-haknya tidak hanya melalui medan pertempuran namun melalui jalan negosiasi dan diplomasi yang akhirnya menghasilkan kesepakatan berupa sebuah perjanjian internasional dalam bentuk Perjanjian Damai antara Israel dan Palestina. Tentunya dengan harapan bahwa perjanjian tersebut dapat mengakhiri konflik yang terjadi

¹⁷ (1) Negara Yahudi mencakup 57 persen dari total wilayah Palestina dan meliputi hampir seluruh area yang subur. Perimbangan penduduk di wilayah ini adalah 498.000 Yahudi dan 497.000 Arab. (2) Negara Arab Palestina mencakup 42 persen dari total wilayah Palestina, dengan kondisi wilayah hampir semuanya berbukit-bukit dan tidak produktif. Perimbangan penduduk di wilayah ini adalah 10.000 Yahudi dan 105.000 Arab. (3). Zona internasional (Jerusalem) dengan perimbangan penduduk 100.000 Yahudi dan 105.000 Arab. Lihat Adian Husaini, *Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel*, (Jakarta, Khairul Bayan, 2004), h. 21

¹⁸ Berdasarkan pemungutan suara MU-PBB atas Resolusi PBB No. 181 menghasilkan 33 suara setuju lawan 13 suara menolak, dan 10 suara Abstain serta 1 absen. Di antara negara yang tunduk pada tekanan AS adalah Perancis, Ethiopia, Haiti, Liberia, Luksemburg, Paraguay, dan Filipina.

¹⁹ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Ala Yahudi: Mengungkap Fakta Hubungan Amerika Serikat-Israel*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 29

Pada dasarnya segala jenis hubungan menunjukkan adanya sifat konflik. Termasuk di dalam hubungan di kawasan, yang hampir menunjukkan adanya suatu konflik. Dan konflik memiliki karakteristik-karakteristik seperti konflik kekerasan, krisis dan persaingan. Konflik dapat didefinisikan sebagai situasi persaingan, dimana satu pihak mengetahui akan ketidaksesuaian posisi kekuatan mereka dimasa depan dan pihak lain berkeinginan dapat menduduki posisi tersebut, akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan keinginan pihak pertama.²⁰

Semua konflik sebenarnya meliputi waktu dan terdiri dari rangkaian situasi Negara. Apabila rangkaian itu diatur oleh hukum yang adil, maka akan tercipta hubungan yang stabil antara keadaan Negara hari ini dan esok, atau dapatlah dikatakan antara keadaan kemarin, hari ini dan esok terdapat system yang dinamis, umumnya keadaan itu dapat digunakan untuk memprediksi system Negara pada masa yang akan datang.²¹

Konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik timbul dari perpaduan berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Konflik tersebut umumnya disebabkan pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah territorial, keamanan, semangat, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah Negara yang tidak bersahabat dan lain-lain.²² Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan tersebut, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan Negara lainnya.

Suatu bidang masalah, merupakan pertikaian antar negara yang mencakup tuntutan yang harus dipenuhi. Perilaku konflik (sikap dan tindakan) merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lainnya. Bidang masalah yang paling tradisional ialah

²⁰ Kenneth E. Boulding, *Conflict and Defense: General Theory*, (New York, Harper Torchbooks, 1963), h. 5

²¹ Kenneth E. Boulding, *Conflict and Defense: General Theory*, (New York, Harper Torchbooks, 1963), h.19

²² K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, (Bandung : Bina cipta, 1992), h. 592

wilayah teritorial, tapi penguasaan wilayah teritorial sulit sekali untuk dinyatakan sebagai satu-satunya kondisi yang menimbulkan konflik internasional.²³

Suhu ketegangan berkaitan dengan sikap dan predisposisi seperti prasangka dan kecurigaan masyarakat dan para pengambil kebijaksanaan suatu negara terhadap negara lainnya. Suhu tidak dengan sendirinya akan menimbulkan konflik, kecuali jika salah satu negara cenderung menerapkan perilaku konflik untuk mencapai sasaran yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan negara lain. Pemerintahan Israel dan Mesir satu sama lain saling menunjukkan sikap tidak mempercayai, kekhawatiran serta kecurigaan, tetapi pertentangan tuntutan di antara mereka mengenai masalah penguasaan Yerusalem serta Jazirah Sinai, timbul karena kecendrungan atau sikap yang mengarah pada penerapan tindakan diplomatik atau militer. Dengan kata lain, antogonisme, tidak percaya, kecurigaan dan sebagainya, juga bukan merupakan kondisi yang memadai untuk menimbulkan konflik atau krisis.

Politik luar negeri Israel memiliki sejarah panjang, yang dimulai ketika adanya kemerdekaan menurut versi negara Israel. Terlepas dari pro kontara pada saat Israel Ada beberapa tahap bentuk politik luar negeri Israel dalam berbagai fase waktu dan rezim yang memegang pemerintahan Israel. Pada tiap fase nya memiliki kebijakan yang diterapkan pada pemerintahannya.

- **Politik Luar Negeri Israel Setelah Kemerdekaan**

Politik Luar Negeri Israel dibentuk setelah tanah yang dijanjikan didapat oleh kaum Yahudi pada tahun 14 Mei 1948 dengan perdana menteri pertama yaitu dipimpin oleh David Ben-Gurion. Pada masa ini, politik luar negeri Israel lebih mendalami institusi penting yang ada di negaranya tersebut seperti pembangunan lembaga-lembaga negara. Pencarian pengakuan kedaulatan negara juga menjadi tujuan utama politik luar negeri Israel pada masanya. Kemudian, setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, idealis gerakan zionis di negara tersebut berharap bahwa para pemimpin Israel dapat mengambil pola serius ramalan gambar negara itu sebagai bentuk salah satu arah politik luar negeri Israel yaitu *a*

²³ Konflik dapat timbul dalam bidang-bidang misalnya struktur tariff, harga minyak, pengembangan senjata nuklir, perlakuan terhadap minoritas di suatu negara.

light unto the nations ' berbasiskan kebijakan di atas prinsip-prinsip keadilan dan hak azasi manusia²⁴. Dalam waktu singkat, tekanan politik luar negeri ekstrim diberlakukan atas kerentanan keamanan Israel atas negara-negara Arab disekitarnya, Hubungan luar negeri Israel muncul untuk menetap ke alur real politik. Sesuai dengan asumsi, realis organ negara dan lembaga itu yang penting, dan non-state-to-state hubungan, semakin menonjol dalam kontemporer Amerika utara dan Eropa barat. Dan berpikir tentang yang diabaikan atau tunduk pada pertimbangan nasional²⁵. Bentuk arah ini menjadi prinsip politik luar negeri Gurion pada masa itu.

Di tahun 1953, Gurion mengundurkan diri dan menjabat sebagai menteri pertahanan. Perdana Menteri Selanjutnya digantikan oleh Moshe Sharett, dan kekuasaan Perdana Menteri kembali kepada Ben-Gurion. Pada masa Gurion ini, terjadi perang pertama Arab-Israel yang terjadi di gurun Sinai antara Israel dan Palestina. Politisi dari Partai Mapai ini memulai melakukan pendekatan internasional termasuk hubungan baik dengan Amerika Serikat terhadap kejadian tersebut dengan melakukan kampanye politik.

Kampanye politik pun dimulai dengan penyelenggaraan dengan Dewan Keamanan hampir segera setelah pertempuran dimulai. Tujuannya berubah secara bertahap untuk memenangkan legitimasi Israel terhadap dunia luar dalam perang enam hari dalam pertempuran melawan Mesir di Gurun Sinai²⁶. Dalam peperangan ini dimenangkan secara militer oleh Kubu Israel, Prancis dan Inggris, tetapi kemenangan dalam politik dimenangkan oleh Mesir melalui keberhasilan menasionalisasikan Terusan Suez.

- **Politik Luar Negeri Israel Paska Perang Enam Hari**

Politik Luar Negeri Israel semakin dalam percaya diri setelah kemenangan telak dalam perang enam hari. Politik Luar Negeri Israel dikomandoi oleh perdana

8. Cohen, Raymond (1994). *Journal Middle East Quarterly : Israel's Starry-Eyed Foreign Policy vol 2*. dikutip dari <http://www.meforum.org/221/Israels-starry-eyed-foreign-policy>

²⁵. Cohen, Raymond (1994). *Journal Middle East Quarterly : Israel's Starry-Eyed Foreign Policy vol 2*. dikutip dari <http://www.meforum.org/221/Israels-starry-eyed-foreign-policy>

²⁶. Rosenthal, Yemima (2009). *Journal Document of Israel Foreign Policy : Volume 12 The Sinai Campaign The Political Struggle, October 1956 – March 1957* Jerusalem

menteri ke empat dan perdana menteri pertama perempuan Israel yaitu Golda Meir. Pada masa kepemimpinan Golda, PLN Israel lebih terkonsentrasi pada pada front diplomatik - berseni pencampuran diplomasi personal dengan penggunaan terampil dalam menampilkannya dalam media massa.

Pada Masa ini terjadi peristiwa besar yang terjadi seperti Pembantaian Munchen dan Perang Yom Kippur yang membuat arah gerak Politik Luar Negeri Israel sedikit konfrontatif. Walaupun mendapatkan kemenangan tipis atas perang Yom Kippur, Israel tidak bisa mengendalikan gejolak politik yang ada didalam negerinya sehingga Golda turun tahta

- **Politik Luar Negeri (Fokus : Israel dan PLO)**

Pada fase ini, fokus dari Politik Luar Negeri Israel mulai memasuki dominasi hubungan Israel – Palestina. politik luar negeri Israel diwarnai oleh beragamnya sikap Israel terhadap negara-negara Arab tetangganya, seperti penandatanganan perjanjian Camp David dengan Mesir pada 1978, serta invasi ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun yang sama. Pada decade selanjutnya politik luar negeri Israel identik dengan agresifitas militer. Hal tersebut terlihat dari adanya penyerangan reactor nuklir Irak pada 1981, invasi ke Lebanon pada 1982, serta pengeboman markas besar PLO di Tunisia pada 1985.²⁷

Hal ini masih berlanjut sampai sekarang dimana pemerintahan Benyamin Netanyahu. Meneruskan wacana perdamaian diantara edua negara. Melanjutkan kembali pembicaraan perdamaian palestina-Israel menyebabkan upaya oleh pemerintah Israel untuk memperbaiki status hukum referendum yang membutuhkan referendum untuk menyetujui penarikan Israel dari teritorial di bawah kedaulatan menjadi dasar hukum.²⁸ Dalam kasus hukum ini telah ada relevansi arus *American-Sponsored Negotiations* berakhir dengan kesepakatan, dan teritorial Israel-palestina termasuk sebuah divisi dari yerusalem dan / atau wilayah tukar, dalam melakukan tawar-menawar mereka di sekitar referendum hukum hubungan antara politik domestik dan kebijakan luar negeri.

²⁷. Pradana, Hafid Jurnal UMM *Fluktuasi Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina*, Malang

²⁸ Sandle, Smhuel *Israeli Coalition Politics and Foreign Policy* . BESA Center Perspectives Paper No. 211, August 19, 2013

Apabila kita menelusuri kembali apa yang menjadi tujuan politik kaum Yahudi ketika meletakkan dasar pemikirannya mendirikan negara Israel bahwa orang Yahudi selalu bersikap bertentangan dengan skema kaum non-Yahudi dalam segala hal. Kalau sekiranya kepada orang Yahudi diberikan kebebasan penuh untuk memilih, dapat dipastikan ia akan memilih untuk menjadi seorang republikein yang anti-kerajaan, seorang sosialis yang anti-republik, atau seorang Boshevis yang anti-sosialis.

Pemikiran tersebut tidak lain disebabkan oleh *pertama*, kekurangmampuan orang Yahudi dalam memahami demokrasi. Watak orang Yahudi yang terbentuk oleh budaya dan agamanya cenderung otoriter. Demokrasi barangkali baik bagi orang lain, tetapi bagi orang Yahudi dimana pun ia berada, ia akan mendirikan suatu masyarakat aristokrasi. Demokrasi oleh orang Yahudi digunakan sebagai alat, sekedar sebuah kata yang digunakan oleh para juru bicara Yahudi sekedar sebagai suatu mekanisme perlindungan kelompok (*group defence mechanism*) di tempat-tempat dimana mereka ditindas, serta untuk mendapatkan status persamaan. *Kedua*, terhadap sikap anti-Yahudi disebabkan pada prasangka keagamaan, ekonomi dan antipati sosial.²⁹

Ideologi Zionisme negara Israel dibentuk sepenuhnya berdasarkan keyakinan keunggulan ras Yahudi. Meski tersebar di seluruh dunia, “bangsa Yahudi adalah bangsa yang satu, ummat pilihan Tuhan, bangsa yang derajatnya di atas ras atau bangsa-bangsa yang lain”. Karena paham itu pula setiap orang Yahudi berdasarkan keturunan darah langsung secara otomatis adalah warga negara Israel dimana pun mereka berada. Penduduk Israel yang non-Yahudi, dapat menjadi warga negara Israel, namun kedudukan mereka sebagai ‘*goyyim*’³⁰, mereka tidak memiliki hak-hak yang sama dengan orang Yahudi. Mempertimbangkan hal tersebut PBB mengeluarkan Resolusi PBB No. 3379-D/10/11/75 yang menyatakan bahwa “Zionisme adalah Gerakan Rasisme”. Resolusi ini hanya mampu bertahan 15 tahun. Setelah Perang Teluk berakhir pada

²⁹ Z.A. Maulani, *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*, (Jakarta : Daseta, 2002), h. 12

³⁰ Di mata kaum Yahudi semua bangsa tanpa kecuali, termasuk orang Arab-Palestina, tergolong ‘*goyyim*’, yang artinya lebih rendah derajatnya dari manusia, dan karenanya ‘tidak boleh dan tidak dapat diperlakukan sebagai manusia’

tahun 1991, atas desakan Amerika Serikat, Resolusi PBB No.3379-D/10/11/75 tersebut dicabut.

Prinsip kewarganegaraan ganda itu dikaitkan dengan banyaknya kedudukan di bidang politik, ekonomi dan militer di Amerika Serikat yang kebetulan diduduki atau dikuasai oleh orang Yahudi, mengakibatkan nyaris semua kebijakan Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan negara Yahudi Israel.

B. Unsur Politik Luar Negeri Israel

Mengingat sumber daya alam Israel yang terbatas dan memanasnya hubungan negara Israel dengan beberapa Negara-negara Arab terutama dengan Palestina, banyak dari kebijakan luar negeri Israel yang bertujuan untuk mempertahankan diri. Kebijakan ini secara sadar terkait dengan perhitungan-perhitungan yang matang dan strategi yang jitu dalam melakukan ekspansinya ke negara-negara lain. Dalam hal ini peneliti membahas unsur-unsur Politik Luar Negeri Israel³¹ :

a) Strategi Pertahanan

Strategi pertahanan dalam politik luar negeri sangat diperlukan oleh Israel karena mengingat Israel menghadapi beberapa lawan potensial terutama dalam kawasan Timur Tengah sendiri, Israel harus tetap waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi karena sifat ekspansionisnya sehingga harus ada usaha untuk mencegah kemungkinan tindakan kolektif negara-negara Arab untuk melawan Israel. karena itulah Israel melihat bahwa masuk sebagai salah satu dari divisi di Arab sebagai posisi yang menguntungkan.

b) Demonstrasi *Utility* Strategis Israel

Paska deklarasinya Israel melihat bahwa menjalin hubungan dengan Amerika Serikat yang pada masa itu sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya Israel merupakan sebuah posisi yang sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi, militer dan politik. Selain itu Israel juga menjalin kerjasama dengan Inggris dan Perancis untuk memperkuat keberadaannya. Karena Salah satu tujuan

³¹ Telhamy, Shibley. 1990. *Israeli Foreign Policy: A Static Strategy in a Changing World*. Middle East Institute

dari kolaborasi Israel dengan AS, Perancis dan Inggris adalah untuk mendukung kepentingan Barat di Timur Tengah.

c) Dilema strategi Israel pada 1970an

Setelah pengusiran pasukan Uni Soviet pada tahun 1972 dari Mesir secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Mesir mulai memiliki pandangan satu ideologi dengan Amerika Serikat, hal ini secara otomatis membuat Israel semakin dilema terhadap Politik Luar Negeri nya dengan AS. Karena Israel berpandangan bahwa jika AS beraliansi dengan Mesir dan Mesir menjadi fasilitator antara AS dengan negara-negara anggota Timur Tengah maka Israel bukan menjadi apa-apa lagi di mata Amerika Serikat. Dengan munculnya negara-negara Arab menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat berpotensi mengancam hubungan AS-Israel.

d) Setelah *Camp David*

Meskipun perjanjian *camp david* telah diterima oleh semua pihak baik Mesir maupun Amerika Serikat, dianggap sebagai satu langkah dalam proses politik luar negeri Israel yang semakin agresif. Israel semakin terpojok saat Mesir dan Amerika Serikat mulai membangun hubungan baik untuk perdamaian di regional tersebut. Mesir bisa menjadi bahkan lebih memiliki prospek untuk beraliansi jika hal itu untuk meningkatkan hubungan dengan sejumlah negara Arab dari pada Israel. Dengan demikian Israel mempunyai dua *momok* kekhawatiran dalam Politik Luar Negerinya yaitu: Pencegahan hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Mesir dan pencegahan rekonsiliasi hubungan Mesir dan dunia Arab. Keberhasilan strategi Israel ini dapat dilihat pada tahun 1990 yakni pada saat Israel mencapai hubungan strategis lagi dengan Amerika Serikat, yang berpuncak pada masuknya Israel dalam penelitian SDI sekaligus penandatanganan beberapa perjanjian untuk kerjasama strategis. Di sini Mesir tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.

Unsur politik yang inheren melekat pada masyarakat Yahudi ialah dimana saja mereka itu berada mereka senantiasa akan membentuk semacam “negara” sendiri di dalam negara tuan-rumah. Ketertutupan sikap masyarakat Yahudi yang lebih mengutamakan hubungan internal di antara mereka sendiri, menjadi salah satu penyebab utama yang menimbulkan sikap anti-Yahudi.

Mencermati sikap politik Tel Aviv terhadap proses perdamaian dengan Palestina nampak tidak menunjukkan keseriusan yang berarti dan bahkan menunjukkan bad faith. Semakin gencarnya Israel melakukan penindasan terhadap warga Palestina melalui invasi militer dan penggunaan kekerasan terhadap kemanusiaan memberikan gambaran betapa sulitnya Israel mematuhi resolusi-resolusi PBB dalam kerangka land for peace, sebagaimana tersirat dalam resolusi DK-PBB no. 242 (1967) dan diperkuat Resolusi no. 338 (1973) yang intinya, Israel mendapatkan pengakuan Negara Timur Tengah dan Palestina mendapatkan wilayah untuk mendirikan negara.

Kepala Otorita Palestina (Ramallah) Mahmoud Abbas mengatakan, sampai saat ini 130 negara di dunia telah menyatakan mengakui berdirinya negara Palestina Merdeka. Dikatakannya bahwa dari 130 negara itu sebagian sudah menyatakan sikap mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 1988 sementara sebagian lagi baru mengumumkan sikapnya belum lama ini. Abbas menambahkan, saat ini 10 negara di kawasan Amerika Latin telah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina dan sekitar 20 negara lainnya akan segera mengumumkan sikap mereka.

Di luar negara-negara Arab tersebut, Palestina pun yang tengah berjuang untuk dapat mendirikan sebuah negara merdeka tampaknya memiliki peluang yang cukup besar dalam hal proses demokratisasi, sebagaimana dikatakan William B. Quandt bahwa "*Among Palestinians, interest in democracy is growing*".³²

Menurut Quandt, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantaranya adalah pengalaman buruk masa lalu mereka dengan rezim-rezim Arab yang otoriter (Mesir di bawah Nasser, Suriah di bawah Assad, Irak di bawah Saddam) di satu sisi dan pengaruh kehidupan politik yang lebih demokratis di tetangga dekat Palestina (Yordania dan Israel) di sisi lain.

³² William B. Quandt, "*The Palestinians Future; The Urge for Democracy*", Foreign Affairs (July/August 1994)

Di Yordania dan Israel, misalnya warga Palestina dapat merasakan adanya pemilihan umum dan pers yang relatif bebas. Kendati Raja Hussein masih menjadi pusat kekuasaan utama, namun terdapat eksperimen demokrasi yang impresif di Yordania. Begitu pula dengan Israel, kendati penindasan terhadap warga Palestina masih terus berlangsung, namun kehidupan politik internal Israel berjalan dengan cukup demokratis. Di samping itu pula, terdapat sejumlah kaum diaspora Palestina yang hidup di bawah sistem politik demokrasi liberal di negara-negara Barat yang dengan sendirinya ikut mempengaruhi pandangan mereka tentang demokrasi.

Hegemoni politik AS di Timur Tengah terlihat jelas dari penyelenggaraan KTT Ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara (*the Middle East and North Africa (MENA) Economic Summit*) yang pertama di Casablanca, Maroko (Oktober 1994) yang berlangsung tidak lama sesudah penanda-tanganan perjanjian damai Yordania-Israel. Konferensi yang dihadiri semua negara Arab sekutu AS dan Israel ini resminya memang membahas prospek kerjasama ekonomi regional. Namun pesan politis dari KTT MENA I sebenarnya adalah penegasan bahwa Israel sejak saat itu “sudah diterima” oleh para tetangga Arabnya.

Demokrasi adalah sebuah sistem tertentu pemrosesan dan pengakhiran konflik-konflik antar kelompok. Sistem ini memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari penataan-penataan politik lainnya. Karakteristik tersebut adalah :³³

1. Kehadiran dan pengorganisasian kepentingan-kepentingan yang bersaing secara eksplisit dikenali sebagai ciri politik yang permanen. Norma ini mengimplikasikan secara spesifik bahwa (a) beragam kelompok dapat diorganisir untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka, (b). Kelompok-kelompok ini memiliki akses yang dijamin secara institusional pada institusi politik, dan (c) mereka

³³ Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (Editor), *Transisi Menuju Demokrasi Tinjauan Berbagai Perspektif*, Jakarta : LP3ES, 1993

yang kalah namun bermain sesuai dengan aturan tidak dicabut haknya untuk terus bermain.

2. Konflik diproses dan diakhiri mengikuti aturan-aturan yang ditentukan a priori, eksplisit, secara potensial dikenal oleh semua partisipan dan dapat diubah hanya melalui aturan. Konflik jarang ditanggulangi, namun di bawah demokrasi sejumlah keadaan dikenali sebagai terikat secara temporer dalam arti bahwa mereka dapat diubah hanya melalui aturan-aturan sama melalui mana mereka terjadi.
3. Demokrasi merupakan rangkaian hubungan stabil antara tindakan-tindakan kelompok-kelompok dan efek-efek dari tindakan-tindakan ini terhadap mereka. Karakteristik demokrasi adalah bahwa masing-masing kelompok memiliki pilihan strategi dan strategi itu memiliki konsekuensi.
4. Demokrasi merupakan organisasi kekuasaan politik dalam makna Poulantzas; sebagai sebuah sistem, itu menentukan kapasitas kelompok tertentu untuk mewujudkan kepentingan spesifik mereka.

Di Amerika kedaulatan telah dibagi-bagi, kekuasaan dipisahkan dan fungsi-fungsi digabungkan di dalam berbagai lembaga yang berbeda. Hasil ini dapat dicapai tidak karena teori pemisahan kekuasaan semata (yakni fungsi) yang sudah berlaku umum pada abad delapan belas. Dalam bentuknya yang murni, penugasan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam berbagai lembaga yang terpisah menyebabkan satu lembaga dapat memiliki monopoli fungsi pembuatan undang-undang yang dominan, dengan demikian berarti kekuasaan dipusatkan. Seperti halnya yang diungkap oleh Locke dan Jefferson.³⁴

³⁴ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Ada 11 prinsip yang telah dikenal dan diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh kembang dan bagaimana ia berjalan di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip itu adalah :³⁵

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan Konstitusi; Proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan aturan-aturan tertentu, Prinsip pemerintahan berdasarkan Konstitusi; Proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan aturan-aturan tertentu, harus ada cara yang telah disepakati untuk pembuatan dan pengubahan undang-undang, dan area-area tertentu yang disebut sebagai hak-hak individu yang tidak bisa disentuh oleh kehendak mayoritas. Ciri utama dari prinsip pemerintahan ini adalah Undang-Undang Dasar yang tidak dapat dengan mudah diubah karena keinginan suara mayoritas yang bersifat sementara.
2. Pemilihan Umum yang Demokratis : sebagus apa pun sebuah pemerintahan dirancang, ia tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis.
3. Federalisme, Pemerintahan Negara Bagian dan Lokal: Amerika Serikat memiliki keunikan dalam sistem federal pemerintahannya, di mana kekuasaan dan kewenangan dibagi dan dijalankan oleh pemerintahan lokal, negara bagian dan nasional. Prinsip demokrasi yang mengharuskan desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab mungkin tak berarti banyak bagi negara yang kecil dan relatif homogen, namun prinsip ini bisa menjadi penjaga keamanan yang penting bagi negara-negara yang besar dan heterogen.
4. Pembuatan Undang-Undang: Di AS hukum dibuat pada pelbagai tingkatan, mulai dari dewan-dewan kota, bergerak ke atas melalui

³⁵ Melvin I. Urofsky, *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, Office of International Information Programs US Department of State

badan legislatif negara bagian, sampai ke Kongres AS. Kunci pembuatan hukum yang demokratis tidak terletak pada tata cara atau bahkan forum di mana peraturan itu dihasilkan, melainkan pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat.

5. Sistem Peradilan yang Independen: Di AS pengadilan bisa menyatakan bahwa tindakan Kongres dan badan parlemen di tingkat negara bagian tidak sah karena bertentangan dengan Konstitusi dan bisa memerintahkan suatu tindakan oleh kepresidenan atas alasan yang sama. Pembela terbesar hak-hak individu di AS adalah sistem pengadilan; hal ini dimungkinkan karena kebanyakan hakim memiliki masa jabatan seumur hidup dan dapat memusatkan perhatian tanpa terganggu oleh politik.
6. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan: Di AS Konstitusi telah menarik garis jelas sekitar kekuasaan presiden, dan meskipun lembaga tersebut adalah salah satu yang terkuat di dunia, kekuatan itu berasal dari kesepakatan dari yang diperintah dan bersandar pada kemampuan penghuni Gedung Putih untuk bekerja sama secara baik dengan cabang-cabang lain dari pemerintahan.
7. Peran Media yang Bebas: Dalam demokrasi, rakyat bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, untuk memaparkan kesalahan penerapan hukum atau ketidakefisienan serta ketidakefektifan kerja sebuah lembaga pemerintah. Tak ada negara yang bisa bebas tanpa adanya pers bebas, dan satu pertanda kediktatoran adalah pembungkaman media.
8. Peran Kelompok-Kelompok Kepentingan: Sudah banyak kritik internal terhadap aspek yang satu ini dari demokrasi Amerika, dan beberapa orang menyatakan bahwa mereka yang punya kepentingan dengan akses uang dalam jumlah besar bisa membuat suara mereka lebih terdengar dibandingkan dengan orang-orang yang sumber dayanya lebih kecil.

9. Hak Masyarakat untuk Tahu: Dalam demokrasi, pemerintah seharusnya sebisa mungkin bersikap terbuka yang artinya, gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama.
10. Melindungi Hak-hak Minoritas: Jika “demokrasi” kita artikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan. Saat menyebut “minoritas” kita tidak mengartikannya sebagai orang-orang yang memilih lawan dari partai yang memenangkan pemilihan umum, melainkan pada mereka yang jelas-jelas berbeda dengan mayoritas karena alasan ras, agama, atau keetnisan.
11. Kontrol Sipil atas Militer: Dalam demokrasi, militer bukan hanya harus berada di bawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, namun ia juga harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran tentara adalah sebagai abdi bukannya penguasa masyarakat.

Dari prinsip-prinsip tersebut diatas yang mendasari adanya kebijakan politik AS. Melihat pada fakta saat ini, ternyata kebijakan-kebijakan politik AS tidaklah semurni yang didengungkan dalam peta politik internasional. Karena seringkali kebijakan-kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan AS semata, bukan untuk proses demokratisasi politik di wilayah Timur Tengah.

C. Kebijakan Politik Luar Negeri Israel

Politik luar negeri suatu negara dirumuskan untuk kepentingan politik dalam negeri. Israel merupakan negara yang sangat memadukan antara kebijakan politik dalam negeri dengan politik luar negerinya, dengan menempatkan faktor keamanan dalam negeri sebagai kepentingan utamanya.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, output kebijakan politik luar negeri suatu negara dihasilkan melalui proses pengambilan keputusan politik luar negeri (*Foreign Policy Decision Making Process*). Seperti dipaparkan John T

Rourke, dalam sebuah negara dengan corak sistem politik demokratis yang memiliki ciri-ciri, yaitu :

1. Terbuka luasnya partisipasi politik
2. Banyaknya hak untuk menentang kebijakan pemerintah atau melakukan kompetisi politik, maka kebijakan politik luar negeri lebih banyak dipengaruhi oleh faktor subnasional (domestik).

Rourke menyebut enam faktor domestik, yaitu :

1. Kepemimpinan politik
2. Birokrasi
3. Legislatif
4. Oposisi politik
5. Kelompok kepentingan
6. Nilai dan opini publik

Negara Israel merupakan negara dengan sistem politik demokratis seperti yang dicirikan oleh Rourke. Dalam sistem politik terbuka dengan tingkat kompetensi politik yang tinggi seperti di Israel, maka proses pengambilan keputusan politik cenderung mengikuti dengan model “politik-birokratik” sebagaimana dirumuskan oleh Graham T. Allison. Model “politik-birokratik” ini sangat menekankan faktor “*bargaining games*” sebagai penentu perilaku politik luar negeri. Menurut model ini, proses pembuatan kebijakan politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional, tetapi politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi. Ini melibatkan berbagai permainan tawar menawar (*bargaining games*) di antara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah “proses sosial”, bukan “proses intelektual”, atau “proses birokrasi”.³⁶

Respon yang beragam datang dari berbagai pihak yang mengecam segala bentuk kebijakan Israel yang dinilai sangat merugikan rakyat Palestina. Tekanan dalam negeri dan regional agar semua negara Arab dan Islam memutus segala

³⁶ Adian Husaini, *Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel*, h. 87

bentuk hubungan dengan Israel, begitu dahsyat hingga sulit bisa bertahan menjalin hubungan dengan negara Yahudi. Beberapa kasus yang terjadi yaitu kasus Qatar yang sedianya mencoba bertahan tetap menjalin hubungan dengan Israel, akhirnya harus menyerah pula di bawah tekanan regional, khususnya dari Arab Saudi dan Iran, menjelang KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Doha bulan November 2000. Hal ini membuktikan bahwa reaksi dapat saja dilakukan sebagai upaya protes terhadap kebijakan politik Israel.

Bahkan Mesir yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak penandatanganan kesepakatan Camp David I tahun 1979, akhirnya menarik pula dubesnya dari Israel akhir November 2000. Penarikan Dubes Mesir dari Israel itu, adalah pertama kali terjadi sejak Mesir menarik dubesnya dari Israel pada tahun 1982 sebagai protes atas invasi Israel ke Lebanon saat itu.

Keputusan Presiden Husni Mubarak menarik dubesnya dari Israel itu, disambut hangat baik di dalam negeri maupun dari negara Arab lain. Harian terkemuka Mesir, *Al Ahrām* menyebut, keputusan Presiden Mubarak menarik dubesnya dari Israel sebagai klimaks dari hilangnya kesabaran Mesir setelah Israel secara membabi buta membombardir sasaran sipil dan militer Palestina di Jalur Gaza dengan helikopter tempur, tank dan kapal perang.

Reaksi rakyat Arab terhadap tindakan represif Israel menghadapi Intifadah Palestina itu, kini terus berkembang dengan munculnya seruan memboikot segala bentuk hasil produksi Israel dan negara-negara Barat, khususnya AS. Media massa Arab banyak menurunkan polemik tentang efektivitas boikot komoditas produksi Israel dan AS. Para kolonnis Arab sepakat, bahwa memboikot komoditas dan modal Israel atau perusahaan yang bekerja sama dengan Israel adalah wajib. Menurut mereka, bangsa Arab dan umat Islam harus komitmen memboikot semua bentuk barang hasil produksi Israel atau perusahaan yang menjalin kerja sama dengan Israel, sebagai protes atas tuntutan Israel meminta kedaulatan atas kompleks Masjid Al Aqsa dan tindakan represif Israel atas rakyat sipil Palestina.

Namun, pada kenyataannya tidak semua pihak setuju dengan aksi boikot produksi Israel dan AS. Ada sebagian pihak yang menentang seruan memboikot

produksi AS itu, dengan berpendapat bahwa sebenarnya aksi boikot tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap kebijakan Israel, lantaran ekonomi negara Arab masih terlalu lemah untuk melepaskan diri dari pengaruh AS yang sangat kuat, bahkan sebaliknya aksi boikot negara-negara Arab tidak banyak berpengaruh pada ekonomi AS. Negara-negara Arab masih sangat butuh impor suku cadang pesawat sipil dan tempur, peralatan militer dan pelbagai produk berteknologi tinggi milik AS.

Gazi Qasiby, seorang kolonnis Arab Saudi mengusulkan alternatif lain daripada boikot yaitu menyisihkan satu dollar AS dari hasil penjualan minyak satu barrel sehari untuk dana perjuangan rakyat Palestina. Diperkirakan, dari penyisihan satu dollar itu, akan berhasil dihimpun dana 15 juta dollar AS sehari. Usulan lainnya yaitu setiap warga Arab yang bekerja menghibahkan gajinya sehari untuk mendukung lobi Arab di AS, hingga bisa menandingi lobi Yahudi yang sangat kuat itu.

Desakan kuat dari kubu pro boikot menyerukan kepada rakyat Arab semampunya memboikot produksi AS. Seorang kolonnis pro pemboikotan dari Mesir, Fahmi Huweidi, menurunkan artikel dengan judul “boikotklah sejauh kalian mampu” di harian *Ashraq Al Ausat* edisi Senin 11 Desember 2000. Jika pemerintah tidak mampu memboikot produksi AS, maka rakyatlah yang harus bergerak memboikot, dan bila semua rakyat tidak mampu memboikot, maka sebagian rakyat yang mampu saja. Dia mencotohkan, seruan memboikot restoran McDonald’s di India dan usaha mengurangi pengaruh makanan produk AS di Perancis, Italia dan Jerman.

Tujuan seruan boikot tersebut bukan dimaksudkan untuk menghancurkan ekonomi AS yang tidak akan banyak pengaruh oleh boikot itu, tetapi guna melindungi makanan produk lokal. Jika rakyat Arab berani mengambil resiko dengan memboikot produksi AS, maka yang terpenting tindakan itu sebuah risalah politik yang kalau terus meluas lingkup boikotnya itu tidak mustahil akan memaksa Pemerintah AS berpikir adil dalam melaksanakan politik luar negerinya, terutama menyangkut kebijakannya terhadap rakyat Palestina.

Pada tanggal 23 September 2011, Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi meminta tawaran untuk kenegaraan di Dewan Keamanan PBB . Permintaan datang setelah berbulan-bulan gagal Eropa dan upaya AS untuk membawa Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan . Otorita Palestina meminta pemungutan suara Dewan Keamanan untuk mendapatkan status negara sebagai anggota penuh PBB daripada pergi ke Majelis Umum . Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa Majelis Umum hanya bisa memberikan Otoritas Palestina status pengamat non – anggota di PBB , tingkat yang lebih rendah kenegaraan . Selain itu, negara-negara Eropa di Majelis Umum membuat jelas bahwa mereka akan mendukung proposal jika Palestina menjatuhkan tuntutan mereka bahwa Israel menghentikan pembangunan pemukiman . Palestina telah lama bersikeras bahwa Israel menghentikan pembangunan permukiman dan dianggap kondisi tidak dapat diterima . Oleh karena itu, Otoritas Palestina lebih suka untuk mengambil kasus ini ke Dewan Keamanan meskipun AS telah berjanji untuk memveto permintaan .

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara pada jam Majelis Umum PBB setelah Abbas mengajukan tawaran untuk kenegaraan . Netanyahu tidak setuju dengan proposal Palestina untuk kenegaraan melalui PBB , mendesak Abbas untuk kembali ke negosiasi langsung dengan Israel . ” Yang benar adalah Palestina menginginkan negara tanpa perdamaian, ” katanya dalam pidatonya .

Keputusan Israel dan Palestina untuk melanjutkan proses perundingan tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan masing-masing. Pemerintah Palestina pimpinan Yasser Arafat cenderung mempunyai kebijakan yang sama dari tahun ke tahun. Yasser Arafat berusaha menempuh jalan perdamaian meskipun mendapat kecaman dari kelompok fundamentalis Hamas. Sedangkan dalam perjanjian kali ini, Israel dipimpin oleh seorang perdana menteri baru Partai Likud yaitu Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu merupakan produk generasi baru yang diharapkan lebih demokratis dan dapat membawa angin segar dalam proses perjanjian damai Israel-Palestina.

D. Peran dan Kebijakan Perdana Menteri Israel

Persepsi para pemimpin atau elite politik pengambil kebijakan luar negeri dipandang oleh Suryadinata sebagai faktor yang sangat menentukan output politik luar negeri. Faktor lain yang mempengaruhi politik luar negeri adalah budaya politik dari elite pengambil kebijakan politik luar negeri. Budaya politik disini didefinisikan sebagai tradisi dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Dalam kasus Indonesia, misalnya tradisi politik luar negeri Indonesia sejak tahun 1945, adalah budaya abangan lebih mendominasi kebijakan politik luar negeri, sehingga politik luar negeri Indonesia memang bercorak sekular, meskipun mayoritas pelaku pengambil keputusan politik luar negeri Indonesia beragama Islam.³⁷

Menurut Holsti, untuk menjelaskan dan memahami *output* (kebijakan luar negeri), perlu dikaji mengenai persepsi, kesan, sikap, nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan yang bertanggung jawab untuk memformulasikan sasaran dan tindakan (kondisi aktor pengambil kebijakan). Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi penetapan sasaran, keputusan, dan tindakan, diklasifikasikan sebagai “penetapan situasi” (*definition of situation*). “penetapan situasi” mencakup kondisi eksternal dan domestik, kondisi historis, dan kontemporer yang dianggap relevan oleh para pembuat keputusan terhadap masalah politik luar negeri.³⁸

Merujuk kepada rumusan Holsti tersebut, terdapat tiga faktor determinan yang berpengaruh terhadap formulasi pragmatisme politik luar negeri Israel, dapat ditempatkan dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Israel, dengan meletakkan aktor utama pengambil kebijakan politik luar negeri Israel (Perdana Menteri Israel) pada posisi sentral pengambil keputusan. Kedua faktor determinan lainnya, yaitu kondisi politik dalam negeri dan faktor internasional dapat ditempatkan sebagai faktor “penentu situasi” yang mempengaruhi sang aktor utama dalam menentukan kebijakan politik Israel yang pragmatis.

³⁷ Roger Graudy, *Israel dan Praktek-praktek Zionisme*, (Bandung : Pustaka, 1988), h. 34

³⁸ Roger Graudy, *Israel dan Praktek-praktek Zionisme*, (Bandung : Pustaka, 1988), h. 3-4

Secara lebih terperinci, Holsti menyebut sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perumusan politik luar negeri suatu negara, yaitu (1). Persepsi pembuat kebijakan terhadap tujuan, fakta, atau keadaan, (2). Sikap pembuat kebijakan terhadap suatu realitas berdasarkan asumsi-asumsi permusuhan atau persahabatan, kepercayaan atau ketidakpercayaan, keyakinan atau kekhawatiran, (3). Nilai pembuat kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan pembenaran terhadap keyakinan yang diambilnya, (4). Keyakinan pembuat kebijakan yang dipandang sebagai dalil yang dipandang benar oleh pembuat kebijakan, sekalipun tidak dapat dibuktikan, (5). Doktrin dan ideologi pembuat kebijakan, (6). Analogi, yakni cara membuat kebijakan dalam mengambil keputusan dengan merujuk kepada fenomena historis yang sejenis.³⁹

Merumuskan politik luar negeri Israel sebagai sebuah sistem, Brecher menyebut lima komponen yang menentukan suatu kebijakan luar negeri, yaitu (1). Lingkungan operasional (*the operational environment*), (2). Jaringan komunikasi (*the communication network*), (3). Elite pembuat kekuasaan (*the decision making elite*), (4). Lingkungan psikologi dari elite (*the psychological environment of elite*), (5). Proses formulasi dan implementasi (*the process of formulation and implementation*).

Berdasarkan perumusan sejumlah analisis politik luar negeri tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa persepsi, budaya dan ideologi politik, nilai, lingkungan psikologi dari aktor-aktor utama pengambil kebijakan politik luar negeri, akan menentukan hasil atau corak kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam sistem politik Israel, dan di berbagai negara bahwa aktor utama pengambil keputusan kebijakan luar negeri dipegang oleh kepala pemerintahan dan menteri luar negeri. Di Israel, perdana menteri dan kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, mendominasi sistem politik Israel, meskipun kekuasaannya dibatasi oleh parlemen (Knesset), yang memiliki supremasi tertinggi dalam sistem politik Israel. Sesuai "*Basic Law*" Israel, perdana menteri ditetapkan sebagai "*head of government*".

³⁹ Don Peretz & Gideon Doron, *The Government and Politics of Israel*, (Colorado : Westview Press, 1997), h. 17-18

Kekuasaan riil perdana menteri tergantung pada kemampuan personal dan kinerjanya di dalam pemerintahan. Kondisi Politik dalam Negeri Israel dalam perkembangannya sebagai sebuah negara baru yang jelas berbeda dengan negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah, dimana Israel merupakan negara Yahudi yang dikelilingi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut Islam sebagai agama mereka, maka Israel memilih demokrasi parlementer sebagai sistem pemerintahannya.⁴⁰

Hal ini dikarenakan masyarakat Israel merupakan suatu kumpulan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang negara yang menganut sistem politik yang berbeda-beda, sehingga sistem yang dipilih bagi negara baru semacam Israel haruslah merupakan sistem yang dapat menampung aspirasi masyarakat Yahudi tersebut. Selain harus mengedepankan sistem demokratis, negara Yahudi juga harus bersedia membiarkan berkembangnya berbagai macam kelompokkelompok kepentingan bahkan hingga berdirinya partai-partai politik, dimana mereka harus mengkoordinasi segala aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Yahudi yang kuat di Timur Tengah. Demokrasi parlementer yang dianut oleh negara Yahudi tersebut adalah meliputi sistem pemisahan kekuasaan utama yaitu : legislatif, eksekutif serta yudikatif. Ketiga kekuasaan ini dibiarkan terpisah dan sistem kerjanya menggunakan sistem “saling mengawasi” satu dengan yang lainnya (*check and balances*). Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh pemerintah dalam hal ini adalah seorang perdana menteri dan kabinet, kedudukan mereka memang sangat mendominasi sistem politik Israel, namun kekuasaan mereka dibatasi kekuasaan legislatif atau parlemen yang di Israel disebut dengan Knesset. Knesset memiliki supremasi tertinggi dalam sistem politik Israel. Sesuai “*basic law*” Israel, perdana menteri ditetapkan sebagai “*head of the government*”. Kekuasaan riil perdana menteri tergantung pada kemampuan personal dan kinerjanya di pemerintahan. Di bidang legislatif, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi parlementer, parlemen Israel mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Knesset Israel merupakan badan legislatif yang tertinggi. Badan ini berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi

⁴⁰ Riza Sihbudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung : PT. Eresco, 1993, h. 106

jalannya roda pemerintahan. Dalam kiprahnya Knesset dibagi menjadi 12 komisi, dari 12 komisi tersebut ada 2 komisi yang dianggap paling penting, yaitu komisi urusan luar negeri dan keamanan, dan komisi keuangan, dimana dua komisi ini biasanya dikuasai oleh partai yang sedang berkuasa. Kekuasaan yudikatif di Israel, merupakan kekuasaan yang bersifat independen

Sistem pemerintahan negara Israel : **Parlementer, Presiden** adalah kepala negara yang sifatnya representasional. **Perdana Menteri (PM)** adalah kepala pemerintahan dari pimpinan parpol yang merupakan pemenang pemilu bersistem proporsional. **Parlemen** (disebut *Knesset*) punya 2 tugas utama yaitu mengotorisasi pembuatan konstitusi dan mengeluarkan perundang-undangan secara umum. **Judisial** Israel terdiri atas Mahkamah Agung yang punya peran sentral dari mengawasi otoritas pemerintahan Israel.

Parlemen: Unikameral (Knesset), Knesset terdiri atas 120 anggota yang dipilih lewat pemilu proporsional setiap 4 tahun. Pemilihan Presiden ditentukan suara mayoritas absolut parlemen. Knesset terdiri atas fraksi-fraksi. Saat ini partai yang menempatkan anggota di Knesset adalah : *Likud* (terdiri atas 27 anggota), *Kadima* (terdiri atas 21 anggota), *Yisrael Beitenu* (pecahan Partai Buruh, terdiri atas 15 anggota), *Shas* (terdiri atas 10 anggota), Partai Buruh (terdiri atas 8 anggota), *Hatenua* (terdiri atas 7 anggota), *Haatzma'ut* (terdiri atas 5 anggota), *United Torah Judaism* (terdiri atas 5 anggota), *Hadash* (terdiri atas 4 anggota), *Habayit Hayehudi* (terdiri atas 3 anggota), *National Democratic Assembly* (terdiri atas 3 anggota, berasal dari Palestina), *Meretz* (disebut juga *New Movement*, terdiri atas 3 anggota), *Ra'am-Ta'al* (terdiri atas 3 anggota), *Ichud Leumi* (terdiri atas 2 anggota), *Otzma Leyisrael* (terdiri atas 2 anggota), *Arab Democratic Party* (terdiri atas 1 anggota dari Palestina), dan Perseorangan (1 anggota).

Knesset dalam [bahasa Ibrani](#) berarti "perhimpunan" dalam bahasa Indonesia juga dikenal kata "kenisah") adalah sebutan untuk [Parlemen Israel](#). Knesset terletak di [Yerusalem](#), yang dinyatakan sebagai [ibu kota](#) Israel. Sebagai cabang legislatif dari pemerintah Israel, Knesset memberlakukan undang-undang, mengawasi pekerjaan pemerintah, dan mempunyai kuasa untuk memungut suara

untuk menyingkirkan [Presiden](#) dan [Pengawas Pemerintah](#) (*State Comptroller*) dari jabatannya, membubarkan diri dengan meminta agar pemilihan umum diselenggarakan lebih awal, atau mengganti pemerintah dan perdana menteri melalui mosi tidak percaya. Knesset pertama kali berhimpun pada [14 Februari 1949](#).

Undang-undang yang disetujui oleh Knesset tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mendasar, yang secara *de facto* merupakan Undang-Undang Dasar Israel. Namun di pihak lain Knesset juga berkuasa untuk menyetujui tambahan-tambahan pada undang-undang yang mendasar.⁴¹

E. Biografi PM Benyamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu adalah perdana menteri Israel, sekaligus ketua umum dari Partai Likud. Sebelumnya, ia pernah memegang beberapa jabatan penting, yaitu sebagai Menteri Kesehatan Israel, Menteri Urusan Pensiunan Israel, dan Menteri Strategi Ekonomi Israel. Ia lahir di Tel Aviv, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1949. Ia merupakan putra dari Zila dan Ben-Zion Netanyahu. Ben-Zion merupakan seorang profesor sejarah yahudi yang juga sekaligus mantan editor Hebrew Encyclopedia atau Ensiklopedi Ibrani. Kakaknya, Yonatan, adalah seorang militer yang tewas pada Operasi Entebbe pada tahun 1976, dan adiknya, Iddo, adalah seorang radiolog dan penulis. Ketiga bersaudara tersebut pernah berdinasi di satuan pengintai Sayeret Matkal.

Saat ia berusia 14 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat dan tinggal di Cheltenham Township, Pennsylvania. Netanyahu muda bersekolah di Sekolah Menengah Atas Cheltenham, lalu ia meneruskan pendidikannya ke Institut Teknologi Massachusetts dan mendapatkan gelar B.Sc di bidang arsitektur. Lalu ia meneruskan jenjang pendidikannya ke MIT Sloan School of Management dan mendapatkan gelar MBA. Ia pun juga pernah belajar ilmu politik di Universitas Harvard. Pada saat itu, ia mengubah namanya menjadi Benjamin Ben Nitai.

⁴¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Knesset>, diakses pada 12 November 2015 pukul 12.10

Setelah ia lulus pasca-sarjana, Netanyahu sempat terjun di bidang bisnis, lalu pada tahun 1982 ia diangkat menjadi Wakil Kepala Misi di Kedutaan Besar Israel di Washington, D.C. Pada tahun 1984, ia dipercaya untuk menjadi Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, dan posisi ini ia emban sampai tahun 1988. Pada tahun 1988, ia terpilih menjadi anggota Knesset (anggota parlemen Israel) di bawah pemerintahan Yitzhak Shamir sampai dengan tahun 1992. Ketika Shamir pensiun dan mengundurkan diri dari bidang politik karena kekalahan partai Likud dalam pemilu tahun 1992, untuk pertama kalinya partai tersebut melakukan pemilu untuk memilih ketua partainya. Netanyahu mencalonkan diri sebagai calon ketua umum partai Likud, dan ia pun menang setelah mengalahkan Binyamin Ze'ev Begin dalam pemilihan tersebut.

Ia memenangkan pemilihan umum sebagai perdana menteri pada tahun 1996, dan memegang posisi tersebut sampai jabatannya habis pada tahun 1999. Netanyahu kemudian mengajukan dirinya lagi sebagai calon perdana menteri dari Partai Likud pada tahun 1999, namun ia kalah dan posisi perdana menteri akhirnya dipegang oleh Ehud Barak. Setelah kekalahan tersebut, Netanyahu mengundurkan diri dari kancah politik Israel. Pada tahun 2002, ia sempat ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, dan kemudian berganti menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

Pada tahun 2005, ia mengajukan dirinya lagi untuk menjadi pemimpin Partai Likud dan ia pun terpilih kembali. Pada pemilu 2009, ia mengajukan dirinya lagi sebagai calon perdana menteri Israel, dan ia pun terpilih kembali dan tetap memegang posisi tersebut sampai sekarang. Semasa hidupnya, Netanyahu pernah menikah tiga kali. Pernikahan pertamanya adalah dengan Miriam Weizmann yang ia kenal sewaktu ia masih di Boston. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu anak yang bernama Noa. Namun keduanya bercerai pada tahun 1978, dan Netanyahu menikah lagi dengan Fleur Cates pada tahun 1981, ia adalah seorang warga negara Inggris. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak, yaitu Yair dan Avner. Pasangan tersebut bercerai pada tahun 1984, dan Netanyahu menikah lagi dengan Sara Ben-Artzi pada tahun 1991.

Ia mempunyai pagilan akrab Bibi. Lahir di Tel Aviv, Israel, 21 Oktober 1949. Benyamin lahir sebagai buah pernikahan Zila dan Ben-Zion Netanyahu (nama aslinya Milikowsky). Sanak keluarga Netanyahu berasal dari Lituania. Ben-Zion merupakan profesor Sejarah Yahudi dan mantan editor Hebrew Encyclopedia (Ensiklopedi Ibrani), dan bekas pembantu senior dari Zeev Jabotinsky. Kakaknya, Yonatan, seorang militer dan terbunuh pada Operasi Entebbe pada 1976. Adiknya Iddo berprofesi sebagai radiolog dan penulis. Ketiga bersaudara ini pernah berdinasi di satuan pengintai Sayeret Matkal.

Netanyahu meraih gelar B.Sc dalam bidang Arsitektur dari Massachusetts Institute of Technology, dan MBA dari MIT Sloan School of Management keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Ia juga pernah belajar ilmu politik di Harvard dan MIT.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Netanyahu pulang ke Israel. Netanyahu mempunyai seorang anak perempuan, Noa, dari pernikahannya yang pertama dengan Micki Weizman. Pernikahan Netanyahu yang kedua adalah dengan Fleur Cates, yang berpindah menjadi pemeluk Yudaisme karena ayahnya Yahudi. Kini ia beristrikan Sarah, istrinya yang ketiga, dan dari dia ia memperoleh dua orang anak yaitu Yair and Avner. Karir politiknya dimulai ketika ia terpilih menjadi anggota Knesset pada 1988 dan duduk di pemerintahan yang dipimpin oleh Yitzhak Shamir dari 1988 s.d. 1992. Mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat ini, terpilih sebagai pimpinan partai Likud tak lama setelah Shamir pensiun dari politik. Netanyahu menang setelah mengalahkan Binyamin Ze'ev Begin, anak almarhum PM Menachem Begin, dan politikus veteran David Levy. (Ariel Sharon mula-mula juga ikut memperebutkan kepemimpinan Likud, namun segera mengundurkan diri ketika jelas bahwa ia akan mendapatkan dukungan yang sangat kecil.) Nama Netanyahu semakin mencuat dan terpilih sebagai Perdana Menteri seiring dengan merosotnya kepercayaan publik kepada Shimon Peres yang dianggap tidak mampu menghentikan gelombang aksi jihad pejuang Palestina yang menyerang warga sipil Israel pada 3 dan 4 Maret 1996. Pejuang Palestina mengadakan dua serangan aksi jihad yang membunuh 32 warga Israel. Kedua

serangan itu menjadi katalisator utama dalam kejatuhan Peres, yang akhirnya melenyapkan hak pilih karena ketidakmampuannya menghentikan aksi jihad melawan orang-orang Israel.

Seakan tak ingin mengulang kegagalan Peres, Netanyahu sebagai Perdana Menteri terpilih tak mau percaya pada ‘jasa baik’ Yasser Arafat dan memelihara kemajuan proses perdamaian terhadap Otoritas Palestina memenuhi kewajibannya—terutama melawan pejuang Palestina.

Politikus dari garis keras Israel ini sering mengabaikan kesepakatan perdamaian yang telah dirintis pendahulunya Yitzhak Rabin dan Shimon. Sebagai contoh, menurut hasil kesepakatan Perjanjian Oslo, pasukan Israel mesti ditarik dari sejumlah daerah pendudukannya. Namun, sampai beberapa tahun, hal itu tak direalisasikannya. Netanyahu pernah melakukan perundingan dengan Yasser Arafat pada forum Persetujuan Wye, namun tiada kemajuan berarti dalam pembicaraan perdamaian tersebut. Bahkan banyak pernyataan ia mencoba mematikan banyak kemajuan.

Tidak hanya itu, pada 1996, Netanyahu dan Walikota Yerusalem Ehud Olmert memutuskan untuk membuka keluaran Tembok Barat. Ini memicu tiga hari pergolakan dari orang-orang Palestina dan mengakibatkan lebih dari selusin warga Israel dan ribuan warga Palestina terbunuh. Tokoh yang dibenci kebanyakan elit dan media massa sayap kiri Israel ini mulai kehilangan dukungan menyusul serentetan skandal dan tuduhan korupsi. Setelah dikalahkan Ehud Barak pada Pemilu Israel 1999, secara temporer Netanyahu beristirahat dari politik. Namun, pada 2002, M Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri saat itu mengangkat Netanyahu sebagai Menteri Keuangan. Setelah pemilihan 2003, Netanyahu menerima jabatan Menteri Keuangan dalam koalisi terbaru bentukan Sharon. Sebagai Menteri Keuangan, Netanyahu menjalankan rencana ekonomi yang hebat untuk memperbaiki ekonomi Israel dari keterpurukannya selama Intifadah al-Aqsa. Rencana itu meliputi langkah terhadap pasar bebas, walau dianggap lawannya sebagai tindakan kontroversial.

Pada pertengahan 2005, ia mengajukan surat pengunduran diri sebagai protes atas penarikan mundur sepihak Israel dari Jalur Gaza. Kebijakan ini

dikeluarkan oleh PM Ariel Sharon, jabatannya sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Ehud Olmert. Menyusul keluarnya Ariel Sharon dari Likud, Netanyahu mengambil alih pimpinan Likud untuk yang kedua kalinya pada 20 Desember 2005

Dalam pidato pada tanggal 6 Mei 2012, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan pemilihan umum dini . Pidato itu dalam menanggapi keresahan di kalangan koalisinya serta lawan-lawannya . Dalam pidato tersebut , Netanyahu berjanji untuk ” membentuk pemerintah seluas itu mungkin. ” Alasan resmi untuk pemilihan awal adalah berakhirnya mendatang Hukum Tal , yang membebaskan orang-orang Yahudi ultra- Ortodoks dari layanan Angkatan Darat Israel . Namun, beberapa analis percaya bahwa pemilu Netanyahu ingin bertindak cepat sementara Partai Likud adalah pemungutan suara kuat .

Pada tanggal 8 Mei , dua hari setelah panggilan untuk pemilihan umum dini , Netanyahu membentuk pemerintah persatuan dengan Shaul Mofaz , kepala baru terpilih dari Kadima , partai oposisi . Koalisi baru memberi Netanyahu mayoritas legislatif yang sangat besar . Hal ini juga mengakhiri kebutuhan untuk pemilihan umum dini . Mofaz dibuat wakil perdana menteri di bawah persyaratan perjanjian. Beberapa melihat koalisi baru sebagai cara bagi Netanyahu untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih politis . Lebih dari 1.000 orang berbaris di Tel Aviv untuk memprotes aliansi . Di antara para demonstran adalah mantan kepala Kadima , Tzipi Livni . Seminggu sebelumnya , setelah kehilangan posisinya baik sebagai pemimpin oposisi dan kepala Partai Kadima , Livni mengundurkan diri dari Parlemen . Dari pengunduran dirinya , Livni mengatakan dia tidak ” bersedia untuk menjual negara untuk ultra – Ortodoks dalam rangka untuk membentuk pemerintahan . ” Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menyesal berfokus pada konflik Israel – Palestina selama masa jabatannya sebagai pemimpin oposisi meskipun itu tidak “dalam mode sekarang . ”

Koalisi baru adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel . Netanyahu berjanji bahwa koalisi akan menulis ulang Hukum Tal , melewati anggaran , merevisi proses pemilu pada akhir 2012 dan bergerak maju dalam proses perdamaian . Koalisi kesatuan yang baru ternyata berumur pendek . Pada

bulan Juli 2012, Kadima meninggalkan koalisi. Kadima Kepala Mofaz mengatakan partainya ditarik keluar karena perbedaan yang tak terdamaikan dengan Netanyahu atas tertunda RUU universal.

Netanyahu dipilih pada 1996 setelah gelombang aksi jihad pejuang Palestina menyerang warga sipil Israel. Shimon Peres-yang didukung di TPS-tak bisa menghentikannya dan kepercayaan publik padanya merosot dengan cepat. Pada 3 dan 4 Maret 1996, pejuang Palestina mengadakan 2 serangan aksi jihad yang mematikan dan membunuh 32 warga Israel. Kedua serangan itu ialah katalisator utama dalam kejatuhan Peres, yang akhirnya melenyapkan hak pilih karena ketidakmampuannya menghentikan aksi jihad melawan orang-orang Israel. Tak seperti Peres, Netanyahu tak percaya pada 'jasa baik' Yasser Arafat dan memelihara kemajuan proses perdamaian terhadap Otoritas Palestina memenuhi kewajibannya-terutama melawan pejuang Palestina. Slogan kampanyenya ialah "Netanyahu-menjaga Perdamaian".

Sering pemerintahan yang baru mengabaikan yang telah menjadi keputusan pemerintahan sebelumnya. Begitu juga Netanyahu yang berasal dari garis keras Israel ini. Perdamaian yang telah dirintis pendahulunya Yitzhak Rabin dan Shimon Peres diabaikan begitu saja. Sebagai contoh, menurut hasil kesepakatan Perjanjian Oslo, pasukan Israel mesti ditarik dari sejumlah daerah pendudukannya. Namun, sampai beberapa tahun, hal itu tak direalisasikan akibat pergantian pemerintahan.

Sebagai PM ia berunding dengan Yasser Arafat pada forum Persetujuan Wye, namun banyak pernyataan ia mencoba mematikan banyak kemajuan. Pendekatan Netanyahu untuk perundingan perdamaian terkenal dengan:

"Jika mereka akan memberi – mereka akan menerima. Jika mereka takkan memberi – mereka takkan menerima".

Tiada kemajuan dalam pembicaraan perdamaian dengan orang-orang Palestina dan Netanyahu gagal mewujudkan langkah yang disetujui atas Persetujuan Oslo. Pada 1996, Netanyahu dan walikota Yerusalem Ehud

Olmert memutuskan membuka keluaran Tembok Barat. Ini meletuskan 3 hari pergolakan dari orang-orang Palestina, mengakibatkan lebih dari selusin warga Israel dan ribuan warga Palestina terbunuh.

Walaupun ia berprogram melawan ‘terorisme’, Netanyahu dibenci kebanyakan elit dan media massa yang dikenal dengan sayap kiri Israel. Setelah serentetan skandal yang panjang (termasuk gosip tentang istrinya) dan pengusutan membuka perlawanan padanya dalam tuduhan korupsi, Netanyahu kehilangan dukungan dari publik Israel. Setelah dikalahkan Ehud Barak pada Pemilu Israel 1999, secara temporer Netanyahu beristirahat dari politik.

E. Kondisi politik dalam negeri Israel

Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya adalah kepanjangan dari politik dalam negeri. Suatu kebijakan dalam politik luar negeri diambil adalah untuk kepentingan politik dalam negeri juga. Karena itu, suatu kebijakan politik luar negeri senantiasa merupakan artikulasi dari berbagai faktor dalam negeri yang berpengaruh terhadap formula kebijakan luar negeri tersebut. Faktor-faktor dalam negeri yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri (*policy influencers*). Biasanya, terjadi hubungan timbal balik yang berkesinambungan antara pengambil kebijakan luar negeri dengan *policy influencers*, sebab keduanya saling membutuhkan. Pengambil kebijakan memerlukan *policy influencers*, sebab mereka adalah para pendukung, yang diharapkan memberikan dukungan politik. Dalam negara demokrasi, dukungan *policy influencers* itu diekspresikan melalui pemberian suara dalam pemilu. Sedangkan *policy influencers* membutuhkan pengambil kebijakan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan atau aspirasi mereka.⁴²

Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara negara demokrasi dan negara autokrasi. Di negara demokrasi, semakin banyak orang yang harus didengar oleh pengambil kebijakan, karena demokrasi berarti pelibatan rakyat secara luas dalam pengambilan keputusan, meskipun terkadang melalui mekanisme tidak langsung. Sedangkan dalam negara autokrasi, *policy influencers*

⁴² Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 308

terbatas pada beberapa orang yang berkuasa, yang mengendalikan organisasi-organisasi penting seperti angkatan bersenjata.⁴³

Gabriel Almond mengkategorikan *policy influencers* ke dalam empat kelompok, yaitu :

1. Elite politik yang meliputi pejabat terpilih atau elite partai
2. Elite administrasi atau elite birokrasi
3. Elite Kepentingan
4. Elite komunikasi, Coplin merumuskan dengan sedikit perubahan empat tipe *policy influencers*, yaitu (1). Partisan (2). Birokrasi (3). Kepentingan dan (4). *Mass influencers (iklim opini massa)*.

Dalam kategori R. Barry Farrel, Israel bisa dimasukkan ke dalam kategori negara dengan sistem politik terbuka, dengan sejumlah ciri-ciri yaitu adanya pemilihan reguler yang bersifat kompetitif, legalisasi dua atau lebih organisasi yang bertujuan menggantikan kepemimpinan dalam pemerintahan, tingkat toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok otonom dalam politik, dan adanya kesepakatan terhadap kelompok-kelompok otonom dalam politik, dan adanya kesepakatan terhadap aturan-aturan konstitusional bagi penguasa pemerintahan. Dalam negara demokrasi sistem terbuka yang stabil, *partisan influencers* memainkan peran terbatas dalam menyetujui atau menolak tindakan-tindakan politik luar negeri. Kasus ini tidak berlaku untuk Israel, sebab di Israel, *partisan influencers* memiliki peran besar untuk menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya di Knesset. *Interest influencers* di negara dengan sistem terbuka biasanya memainkan peran yang lebih besar. Coplin mencontohkan peran lobi Zionis di Amerika Serikat yang mampu mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Dalam sistem ini pula, iklim opini biasanya lebih terbebas dari manipulasi langsung para pengambil keputusan. *Mass influencers* dalam sistem terbuka memainkan peran penting dalam pemilu dan opini publik terhadap suatu kebijakan pemerintah.

⁴³ Don Peretz, *The Middle East Today*, (New York : Praeger Publisher, 1983), h. 273

- **Partai-partai politik Israel.**

Peretz dan Doron menyebut Israel sebagai “*a party-state*” (negara partai). Peran partai dalam kancah politik di Israel sangat dominan. Sampai tahun 1948, sejumlah partai memiliki afiliasi dengan militer organisasi para militer. Irgun Zvai Leumi (IZL) (*National Military Organization*) memiliki hubungan dekat dengan kelompok Zionis Revisionis (cikal bakal partai Likud). Kelompok Palmach, Plugot Mahatz (*Strike Forces*) memiliki kaitan dengan Mapam dan Achdut Ha-Avoda. Dan Haganah memiliki hubungan dengan Mapai. Setelah Ben Gurion menggabungkan seluruh kekuatan militer dan paramiliter ke dalam *Israel Defence Force* (IDF), tidak ada satu pun kekuatan militer yang dikontrol oleh kelompok-kelompok politik.⁴⁴

Sejak Pemilu pertama tahun 1949, kelompok Buruh yang berideologi kiri-sekular sudah mendominasi perpolitikan Israel. Pada Pemilu 1949 itu, dua partai kelompok Buruh, Mapai dan Mapam meraih 65c kursi dari 120 kursi yang diperebutkan di Knesset. Mapai didirikan oleh Ben-Gurion, tokoh Zionis yang mewarisi kepemimpinan Herzl di World Zionist Organization (WZO). Dominasi Buruh itu berlangsung sampai pemilu 1977, setelah dikalahkan oleh Likud.⁴⁵

Tampilnya pemerintahan Likud (Kesatuan) di bawah Menachen Begin pada 1977 merupakan suatu perubahan besar dalam politik Israel. Ketika itu Likud berhasil menyingkirkan partai Buruh sosialis pimpinan Ben-Gurion, yang telah memerintah Israel sejak berdirinya negara ini, tahun 1948, dan menggantikannya dengan paham Zionis Revisionis. Terhadap peristiwa kemenangan Likud atas Partai Buruh tersebut, Findley mencatat : “ *it was the triumph of messianic nationalism over Zionism’s pragmatic and secular mainstream.*”⁴⁶

Sejak 1977 sampai 1992, Likud memegang kendali pemerintahan Israel. Kecuali pada periode 1984-1988, Likud harus berbagi kekuasaan dengan Partai Buruh. Tahun 1992, kembali Partai Buruh mengambil alih posisi, di bawah pimpinan Yitzak Rabin. Likud tampil lagi sebagai pemenang tahun 1996, melalui kepemimpinan Benyamin Netanyahu, yang mengalahkan kandidat Partai Buruh,

⁴⁴ Musthafa Abd.Rahman, *Lima Tahun Kesepakatan Oslo*, Kompas, 4 Mei 1999

⁴⁵ Khalil Shikaki, *Peace Now or Hamas Later*, Jurnal Foreign Affairs, Agustus 1998

⁴⁶ Republika, 27 Februari 1994

Shimon Peres sebagai penerus kepemimpinan Rabin yang tewas tahun 1995. Tiga tahun kemudian, Partai Buruh kembali mengambil alih kendali pemerintahan. Partai Buruh oleh Ehud Barak berhasil menumbangkan Netanyahu dalam Pemilu 1999.

Jika Findley menyebut kelompok Partai Buruh sebagai penganut “Zionis Pragmatis-sekular”, maka Likud disebutnya sebagai penganut garis “nasionalisme Messianik”. Hal itu bisa dilihat pada manifesto Partai Likud tahun 1973: *“The right of jewish people to Eretz Yisrael is eternal and indisputable.”*⁴⁷

Dalam beberapa dasawarsa, kedua kelompok politik terbesar di Israel itu terlibat dalam peperangan sengit, termasuk antara kedua tokohnya, yaitu Ben-Gurion dan Menachen Begin, Ben-Gurion biasa menyebut kaum Zionis Revisionis sebagai kelompok Nazi dan membandingkan Begin dengan Hitler. Sebaliknya Begin menyebut Ben-Gurion seorang pengkhianat Yahudi. Para pejabat Buruh menjalankan Zionisme yang lebih kompromistis, sekalipun mereka tidak selalu mempraktekannya dan menerima gagasan pembagian wilayah Palestina tahun 1947 serta rumusan tanah untuk perdamaian (Land for peace) sebagaimana termuat dalam Resolusi 242. Namun, pejabat Likud tidak mau melakukan kepura-puraan semacam itu, dan mereka tetap berpegang kepada visi Revisionis, yaitu klaim bahwa Eretz Israel yang membentang dari Sungai Nil sampai Eufrat adalah hak bangsa Yahudi yang sudah digariskan Tuhan.⁴⁸

Kedua tokoh Likud, Menachem Begin dan Yitzak Shamir, menolak rencana pembagian wilayah Palestina oleh PBB tahun 1947, sebagaimana dikatakan Begin:”Tanah air kita tidak dapat dibagi-bagi. Setiap usaha untuk memotong-motongnya bukan hanya kriminal melainkan tidak sah. Orang yang tidak mengakui hak kita atas seluruh tanah air ini berarti tidak mengakui hak kita atas bagian mana pun darinya”. Begin juga menyatakan : “Kita tidak akan pernah menyetujui pembagian tanah air kita”.⁴⁹

Warisan konflik ideologi dan politik antara Likud dan Buruh itulah yang senantiasa mewarnai politik Israel setiap menghadapi Pemilu, meskipun keduanya

⁴⁷ Musthafa Abd.Rahman, *Lima Tahun Kesepakatan Oslo*, Kompas, 4 Mei 1999

⁴⁸ Adian Husaini, *Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel*, h. 103

⁴⁹ Republika, 22 Februari 1995

sama-sama Zionis dan menginginkan keselamatan eksistensi negara Israel. Keduanya hanya beda dalam cara dan gaya dalam menjalankan misinya. Bisa disimpulkan, pertikaian antara Buruh dan Likud dalam soal Palestina dan lawan-lawan Israel lainnya hanyalah sebatas pertarungan politik untuk memperebutkan pengaruh rakyat atau kursi kekuasaan dalam pemerintahan Israel. Sebab, pada periode 1984-1988, Likud dan Buruh membangun koalisi bersama dalam pemerintahan.

Pada tahun 2000, setelah koalisinya berantakan pasca Camp David II, Barak juga berinisiatif mendekati pimpinan Likud untuk menjajaki kemungkinan pembentukan koalisi antara Likud dan Buruh. Seorang tokoh Buruh Yitzak Rabin yang melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap warga Palestina. Meskipun mengklaim Eretz Israel sebagai hak abadi bangsa Yahudi, tetapi pada 1979, Begin juga bersedia menandatangani kesepakatan Camp David dan menyerahkan Semenanjung Sinai kepada Mesir.

Sebagai contoh, dalam kasus pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Jika pihak Likud menyatakan dengan terang-terangan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, pihak Buruh biasanya melakukannya dengan diam-diam. Warga Israel dalam kelompok Peace Now, yang menentang perluasan pemukiman Yahudi, menyatakan bahwa sejumlah pemukiman Yahudi di wilayah Palestina membengkak dalam empat bulan pertama tahun 2000. Kementrian Dalam Negeri Israel memperlihatkan jumlah pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza meningkat menjadi 13.000 atau 7,5 persen, antara Juli 1999 sampai Juli 2000, Peace Now menyatakan bahwa Ehud Barak bertanggung jawab atas masalah ini.

Pada tanggal 8 Mei, dua hari setelah panggilan untuk pemilihan umum dini, Netanyahu membentuk pemerintah persatuan dengan Shaul Mofaz, kepala baru terpilih dari Kadima, partai oposisi. Koalisi baru memberi Netanyahu mayoritas legislatif yang sangat besar. Hal ini juga mengakhiri kebutuhan untuk pemilihan umum dini. Mofaz dibuat wakil perdana menteri di bawah persyaratan perjanjian. Beberapa melihat koalisi baru sebagai cara bagi Netanyahu untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih politis. Lebih dari 1.000 orang berbaris di Tel

Aviv untuk memprotes aliansi . Di antara para demonstran adalah mantan kepala Kadima , Tzipi Livni . Seminggu sebelumnya , setelah kehilangan posisinya baik sebagai pemimpin oposisi dan kepala Partai Kadima , Livni mengundurkan diri dari Parlemen . Dari pengunduran dirinya , Livni mengatakan dia tidak ” bersedia untuk menjual negara untuk ultra – Ortodoks dalam rangka untuk membentuk pemerintahan . ” Dia juga mengatakan bahwa dia tidak menyesal berfokus pada konflik Israel – Palestina selama masa jabatannya sebagai pemimpin oposisi meskipun itu tidak “dalam mode sekarang . ”

Koalisi baru adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel . Netanyahu berjanji bahwa koalisi akan menulis ulang Hukum Tal , melewati anggaran , merevisi proses pemilu pada akhir 2012 dan bergerak maju dalam proses perdamaian. Koalisi kesatuan yang baru ternyata berumur pendek . Pada bulan Juli 2012, Kadima meninggalkan koalisi . Kadima Kepala Mofaz mengatakan partainya ditarik keluar karena perbedaan yang tak terdamaikan dengan Netanyahu atas tertunda RUU universal.

Pada Februari 2013 , Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengundang mantan menteri luar negeri Tzipi Livni untuk bergabung dalam koalisi dan pembicaraan perdamaian Israel kepala dengan Palestina . Livni , yang membentuk partai Hatenuah untuk dijalankan terhadap Netanyahu dalam pemilihan bulan lalu , juga akan berfungsi sebagai Menteri Kehakiman . Netanyahu dan Livni membuat pengumuman pada konferensi pers . Keduanya mengatakan mereka telah menyisihkan perselisihan masa lalu dan persaingan untuk bekerja sama . ” Saya mengkritik manajemen pemerintah selama empat tahun terakhir , tapi karena pemilu , kami datang untuk pemahaman untuk menempatkan diluar itu semua, ” kata Livni .

Enam kursi parlemen dimenangkan oleh Livni Hatenuah partai juga akan bergabung dalam koalisi Netanyahu . Likud – Beitenu memenangkan 31 kursi dalam pemilu bulan lalu . Kesepakatan dengan Livni dan Netanyahu Hatenuah kiri masih membutuhkan 24 kursi lagi untuk mayoritas di Knesset , parlemen 120 – anggota Israel . Sejak pemilu , Netanyahu mengatakan bahwa ia ingin membentuk ” mungkin pemerintah persatuan nasional luas .

Pada tanggal 18 Maret 2013, janji Netanyahu telah disetujui oleh Knesset , cabang legislatif pemerintah Israel . Melayani di bawah Netanyahu dengan Livni akan Yair Lapid sebagai menteri keuangan , Gideon Saar sebagai menteri dalam negeri , dan Moshe Yaalon sebagai menteri pertahanan. Netanyahu akan melayani sebagai menteri luar negeri.

Perkembangan Pemilu di Israel

Meskipun menyebut dirinya sebagai negara Yahudi (*The Jewish State*), pentas politik Israel ternyata didominasi oleh kaum sekular. Sejak pemilu pertama, Januari 1949 sampai 1977, partai Mapai (yang kemudian menjadi Partai Buruh) mendominasi parlemen Israel (Knesset). Dalam pemilu 1949 misalnya, Mapai yang merupakan partai “Zionis sekular” memperoleh 49 kursi dari 120 kursi (41%) di Knesset. Sementara posisi kedua juga ditempati partai “kiri” sekular Mapam dengan 19 kursi (16%). Sedangkan partai Religious Front hanya memperoleh 16 kursi (13%).

Mulai tahun 1977, pertarungan politik di Israel terbagi dalam dua kubu, yaitu kubu “kiri” dan kubu “kanan”. Kubu kiri terdiri atas dua partai sekular utama, yaitu Partai Buruh dan Meretz, ditambah sejumlah partai kecil, seperti Ratz, Mapam, Shinui, Hadash (*New Communist List*) dan Democratic Arab Party. Sedangkan kubu “kanan” terdiri atas tiga partai sekular yaitu Likud, Tzomet dan Moledet, serta sejumlah partai agama, seperti Mafdal (*National Religious Party*), Ashkenazi Ultra Ortodoks, Agudat Israel dan Sephardi Ortodoks Shas.⁵⁰

Pada Pemilu 1999 Partai Buruh (yang bergabung dengan sejumlah partai kiri membentuk “Gerakan Satu Israel” dengan pimpinan Ehud Barak) hanya meraih 27 kursi. Partai “kiri” lain, seperti Shinui meraih 6 kursi, dan Meretz mendapat 9 kursi. Sementara Likud meraih 19 kursi, Shas 17 kursi, Mafdal 5 kursi, Partai United Torah Judaism 5 kursi. Partai etnis Yisrael Ba’aliya milik imigran Yahudi asal Rusia meraih 7 kursi. Meskipun kekuatan sekular (Buruh dan Likud) masih mendominasi, namun terlihat naiknya perolehan suara partai-partai agama. Dalam pemungutan mosi tidak percaya di Knesset, menjelang dilangsungkannya KTT Camp David II, penentang Camp David II berhasil

⁵⁰ Kompas, 5 Mei 1999

mengalahkan Barak, namun penentang Camp David II tak mampu suara minimal untuk menjatuhkan pemerintahan Barak.

Untuk dapat membentuk pemerintahan, pemenang pemilu harus mampu menggandeng partai lain hingga jumlahnya mencapai minimal 61 kursi. Perolehan suara Partai Buruh justru menurun dibandingkan dengan perolehan suaranya pada Pemilu 1996. Tahun 1996, Buruh mendapat 36 kursi. Tahun 1999, hanya meraih 27 kursi. Perolehan suara yang jauh dari mayoritas itu mempersulit Barak dan partainya untuk mengambil kebijakan luar negeri secara leluasa, apalagi yang menyangkut perdamaian dan pemberian konsesi dengan pihak Palestina. Jumlah kursi partai-partai “kiri” yang pro perdamaian yaitu Buruh (27 kursi), Meretz (9 kursi) dan Shinui (6 kursi) hanya 42 kursi. Jika ditambah dengan kekuatan Partai Tengah pimpinan Yitzak Mordechai (6 kursi) maka jumlahnya baru 48 kursi. Partai-partai kanan yang didominasi Likud (19 kursi), Shas (17 kursi), Yisrael B’Aliya (7 kursi), NRP (5 kursi), United Torah Judaism (5 kursi), cenderung keras dalam soal perdamaian.

Menghadapi konfigurasi politik seperti itu, langkah Barak untuk membentuk pemerintahan menjadi tidak mudah. Selama satu bulan lebih, terjadi negosiasi yang berlangsung alot. Akhirnya pada 1 Juli 1999, Barak memutuskan membangun koalisi partai-partai sekular-kiri dengan partai agama, setelah gagal bernegosiasi dengan Likud. Berdasarkan urutan perspektif ideologis, kiri-tengah, kanan-koalisi pemerintahan Barak terdiri dari atas : (1). Partai Buruh (Gerakan satu untuk Israel) (27 kursi), Meretz (9 kursi), Partai Tengah (6 kursi), Yisrael B’Aliya (6 kursi), Partai Shas (17 kursi), Partai Nasional Agama (5 kursi), partai persatuan Taurat Yahudi (5 kursi). Total jumlah koalisi mencapai 80 kursi, melebihi target 75 kursi (2/3) yang dipasang Barak. Partai Tengah bersedia bergabung setelah mendapat konsesi menteri perhubungan, deputi menteri, serta pos Dubes untuk Amerika Serikat.

Sedangkan Partai Shas yang menentukan keberhasilan koalisi Barak, mendapat jabatan menteri infrastruktur, buruh, kesehatan dan urusan agama. Partai Shas bergabung dengan koalisi setelah ketuanya Aryeh Deri mengundurkan diri karena ditolak oleh Barak. Dari dituduh korupsi selama gabung dengan

pemerintahan Netanyahu tahun 1996. Barak tidak dapat mengabaikan partai-partai agama yang perolehan suaranya cenderung meningkat. Pada Pemilu 1999, kubu agama menguasai 27 kursi. Tahun 1996, kubu agama hanya meraih 23 kursi. Sedangkan pada pemilu pertama tahun 1949, kubu agama hanya meraih 16 kursi. Partai Shas sendiri, pada pemilu 1996 meraih 10 kursi. Dan ketika itu sudah menjadi partai ultra-ortodoks terbesar di Israel. Pada 1999, perolehan kursinya di knesset menanjak menjadi 17 kursi,. Jadi ada kecenderungan menaik pada perolehan suara partai agama. Kelompok-kelompok nasionalis religius ini memandang bahwa pemisahan agama dengan negara adalah penyimpangan dari esensi Judaisme, sehingga mereka mempunyai misi untuk membendung kecenderungan sekularisasi di Israel.

Kecenderungan menaiknya dukungan terhadap kubu agama juga merupakan refleksi meningkatnya jumlah pengikut Yahudi ortodoks di Israel, terutama di Jerusalem. Diperkirakan, pada tahun 2010, sepertiga penduduk Jerusalem adalah warga Yahudi ortodoks. Sedang warga Yahudi sekular hanya 25 persen dari seluruh penduduk. Di Jerusalem, aktivitas Yahudi ortodoks ini dirasakan warga lainnya mengganggu aktivitas kehidupan mereka. Warga Yahudi ortodoks melarang penggalian untuk mencari barang purbakala di kuburan Yahudi, menutup jalan-jalan raya pada Hari Sabtu, melarang laki-laki dan wanita bersembahyang bersama dan meludahi wanita yang mengenakan pakaian mini. Melihat kecenderungan meningkatnya pengaruh Yahudi ortodoks itu, seorang aktivis hak asasi manusia Israel, Shulamit Aloni, menyatakan, Israel secara perlahan bisa berubah dari negara demokratis ke negara fanatis. Sebuah survei yang dilakukan Harian Yediot Aharonot, tahun 1997 menunjukkan terjadinya gelombang kebangkitan agama (*religious revival*) di Israel, pada kurun waktu 1992-1997. Survei itu menunjukkan, 17 persen dari seluruh populasi Yahudi di Israel yaitu 515.000 jiwa melaporkan terjadinya kebangkitan agama pada mereka. Sebanyak 16 persen warga Yahudi bagi anak-anak mereka. Dan sebanyak 50

persen warga Yahudi Israel memandang kebangkitan agama sebagai hal yang positif.⁵¹

Kebijakan Barak yang membentuk koalisi dengan spektrum ideologi luas menjadikan pemerintahannya dari segi jumlah kursi sudah cukup kuat, karena mencapai dua pertiga kursi di Knesset. Akan tetapi, dalam perspektif ideologis, pemerintahan Barak juga rentan perpecahan, terutama ketika menghadapi persoalan isu-isu sensitif masalah status final negara Palestina. Dan ini terbukti saat menghadapi KTT Camp David II, dimana pemerintahan Barak berantakan, karena ditinggalkan beberapa mitra koalisinya. Bahkan David Levy, menteri luar negeri dari Gesher mantan tokoh Likud yang bergabung dengan Partai Buruh membentuk Gerakan Satu Israel juga ikut memboikot KTT Camp David II.

Konfigurasi politik dalam negeri Israel semacam itu memungkinkan terjadinya dinamika politik yang sangat tinggi dan labil. Tidak adanya mayoritas tunggal dalam Knesset, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan setiap waktu, sehingga kebijakan pemerintah bersifat labil, karena memungkinkan diubah kembali oleh pemerintahan berikutnya. Tidak terlalu besarnya perolehan suara kubu Buruh dan partai-partai kiri sekular lainnya, juga menyulitkan tercapainya suatu proses perdamaian berkelanjutan dengan Palestina. Sebab setiap upaya kompromi dalam perdamaian apalagi soal Jerusalem akan ditentang keras oleh kelompok-kelompok keagamaan Yahudi. Padahal perundingan masyarakat kompromi.

Dengan kondisi minoritas di Knesset dan tekanan-tekanan keras dari kelompok-kelompok oposisi dan kelompok keagamaan Yahudi, posisi pemerintahan Barak menjadi sulit dalam menentukan sikap dalam perdamaian dengan Palestina. Karena itulah, bisa dikatakan faktor kondisi dalam negeri Israel tidak terlalu mendukung jalannya proses perdamaian yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah Ehud Barak dalam KTT camp David II, namun Ehud Barak tetap melangkah karena mempunyai pertimbangan lain.

Dominasi mass influencers. Sebagai penganut garis politik Zionis sekular-pragmatis, Ehud Barak dan jajaran pemerintahan dari kalangan Partai Buruh, tentu

⁵¹ Kompas, 29 Juli 1999

mempertimbangkan perkembangan politik kontemporer di dalam negeri Israel, sampai akhirnya harus mengambil keputusan yang pragmatis dalam KTT Camp David II. Menjelang keberangkatannya ke KTT Camp David II, pemerintahan Ehud Barak digoyang keras oleh mitra koalisinya sendiri dan serangan mosi tidak percaya dari lawan-lawan politiknya. Tiga mitra koalisinya Partai Ortodoks Shas, Partai Yisrael B 'Aliya dan Partai Nasional Agama mengundurkan diri dari pemerintahan dan menarik dukungan terhadap pemerintahan Ehud Barak. Ketiga partai yang menguasai 26 kursi di Knesset itu menentang keberangkatan Ehud Barak ke KTT Camp David II, akibatnya pemerintahan Barak yang semula menguasai 68 kursi di Knesset, tinggal menguasai 42 kursi.

Sebelum bertolak ke KTT Camp David, Barak lolos dari usaha mosi tidak percaya dari kubu saingan utamanya, Likud. Hanya beberapa jam sebelum berangkat ke Maryland, Barak selamat dari mosi tidak percaya di Knesset. Dari 120 anggota Knesset, 52 mempertahankan Barak dan 54 lain menolak, serta 7 abstain. Untuk menjatuhkan Barak diperlukan suara minimal 61. Upaya menentang KTT Camp David II juga datang dari kelompok-kelompok agama Yahudi. Baru saja KTT Camp David II berjalan sehari, sekitar 15.000 warga Yahudi menggelar demo di Tembok Ratapan, Jerusalem, menentang KTT Camp David II.

Namun Barak tetap yakin, rakyat Israel lebih banyak yang mendukung daripada yang menentang KTT Camp David II. Sehari sebelum berangkat ke Camp David, Barak menyerukan kepada rakyat Israel agar mendukungnya dalam mengupayakan perdamaian dengan Palestina. Menurut Barak, keberangkatannya ke Camp David adalah demi perdamaian dan keamanan rakyat Israel. Barak juga mengaku tak ambil pusing dengan hilangnya kemayoritasnya di parlemen. Alasannya ia menjadi PM Israel karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan parlemen. "saya tidak dipilih oleh politisi dan partai-partai, melainkan oleh rakyat yang memberi kepercayaan pada saya untuk menuntun ke masa depan yang lebih baik."

Dalam berbagai polling, mayoritas rakyat Israel menghendaki Barak tetap berangkat ke KTT Camp David II. Sebuah polling yang dimuat Harian Yediot

Aharonot menunjukkan : 55 persen setuju Barak berangkat ke Camp David dan 45 persen tidak setuju. Komposisi hasil polling ini hampir sama dengan perolehan suara Barak dalam pemilu 1999, dimana ia meraih suara 55 persen dan Netanyahu meraih suara 44 persen. Barak tampaknya lebih berpegang kepada publik opini (*mass influencers*), ketimbang tekanan-tekanan partai politik (*partisan influencers*) yang dimainkan oleh Likud dan partai-partai agama (Shas, NRP, dan Yisrael B'Aliya), maupun dari kalangan Yahudi Ortodoks (*interest influencers*).

Langkah Ehud Barak yang tetap ingin melanjutkan perundingan damai dengan Palestina dipuji berbagai pihak walaupun mendapatkan tekanan dari lawan-lawan politiknya yang berusaha melemahkan posisinya di Parlemen. Hal ini dapat dipahami bahwa Partai Buruh termasuk partai yang cenderung lunak dan berusaha agar proses perundingan damai dengan Palestina agar tetap berlanjut dan memberikan hasil yang signifikan bagi kedua negara.

Barak dan tokoh-tokoh Partai Buruh memang berpendapat bahwa keamanan negara Israel justru akan tercapai jika Israel sesegera mungkin menyelesaikan berbagai konflik dengan negara-negara tetangganya, terutama dengan pihak Palestina. Untuk itulah Barak bersedia melakukan kompromi, sekali pun hal itu dianggap tidak memadai kubu Palestina.

Indikasi bahwa publik opini di Israel menjadi pertimbangan utama Ehud Barak dalam pengambilan keputusan politik, dapat dilihat dalam kasus pengunduran dirinya dari kursi Perdana Menteri Israel, 9 Desember 2000. Setelah berbagai polling di Israel menunjukkan keunggulan Benyamin Netanyahu atas Ehud Barak, maka Barak mengundurkan diri, meskipun tetap mencalonkan diri dalam pemilihan Perdana Menteri Israel yang diselenggarakan 60 hari setelah pengunduran dirinya. Langkah Barak ini dilakukan untuk mematikan langkah Netanyahu, sebab hanya anggota Knesset yang berhak maju sebagai calon Perdana Menteri dalam pemilu yang dipercepat. Sedangkan Netanyahu bukan anggota Knesset, sehingga tidak dapat maju sebagai calon Perdana Menteri.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

- Pengaruh Kebijakan Politik Israel PM Benjamin Netanyahu Terhadap Proses Perdamaian Israel-Palestina pada Pemilu 2015

Pada Selasa 17 maret 2015, lebih dari 5,8 juta pemukim Israel pergi ke 10.372 TPS ditempatkan di seluruh 25 wilayah pendudukan Israel untuk memilih pemerintahan baru. Menurut Harian Israel Haaretz, pemungutan suara dimulai pada Selasa 17 maret 2015, pukul 07.00 pagi waktu setempat dan ditutup pada hari yang sama pukul 22.00 waktu setempat.

Dalam pemilu Israel itu, ikut 12 partai politik utama atau daftar pemilih gabungan untuk memperebutkan 120 kursi di Knesset (parlemen) Israel. Secara garis besar, partai dan daftar pemilih dalam pemilu Israel kali ini terbagi menjadi dua kategori, Zionis dan non-Zionis, di mana hanya satu partai non-Zionis di antara semua partai berideologi Zionis, yaitu partai koalisi Persatuan Arab terdiri dari warga Palestina yang berada di wilayah jajahan Israel.

Sementara pada pemilihan kali ini diberlakukan aturan baru, di bawah sistem perwakilan di parlemen, semua partai di Israel dapat menempatkan wakil mereka jika mendapatkan lebih dari 3,25 persen suara rakyat, bukan 2% yang diperlukan dalam pemilu sebelumnya. Di bawah sistem pemilu Israel, perdana menteri bukanlah pemimpin partai yang memperoleh kursi terbanyak tapi siapa pun dapat membangun koalisi memerintah mayoritas minimal 61 kursi di parlemen.

Hasil pemilu awal diumumkan pada Rabu 19 maret 2015, partai sayap kanan Likud yang dipimpin Netanyahu memenangkan pemungutan suara dengan memperoleh 30 kursi dari 120 kursi Knesset, disusul kedua terbesar partai kiri-tengah Zionis Union dengan perolehan 24 kursi. Partai koalisi Persatuan Arab secara mengejutkan menjadi partai terbesar ketiga dengan perolehan 14 kursi, disusul Partai Yesh Atid dengan 11 kursi, Kulanu dengan 10 kursi, Habayit Hayehudi dengan delapan kursi, Shas dengan tujuh kursi, Persatuan Yahudi Torah :

Satu dari tujuh warga Palestina dapat memilih dalam pemilihan umum Israel.

Hanya satu dari tujuh dalam jumlah total penduduk Palestina yang hidup di dalam perbatasan Israel pra-1967 dan masih dapat memiliki kewarganegaraan. Sebuah kekuasaan ketiga di bawah peraturan militer Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak bisa memilih (meskipun pemukim ilegal Yahudi yang tinggal di antara mereka dapat memilih). Sementara itu, sekitar setengah dari semua rakyat Palestina dicegah dari kembali ke tanah air mereka oleh Israel; diusir, kecuali mereka yang dipaksa mempunyai alasan mengapa sebagian besar warga Israel adalah Yahudi.

Israel hanya pernah memiliki dua menteri dari non-Yahudi.

Sejak pendirian sepihak negara 'Yahudi' Israel pada tahun 1948, sekitar 600 menteri telah melayani di 33 pemerintahan. Hanya dua dari mereka non-Yahudi, dan mereka menjabat dan bertugas dengan total jika digabungkan sekitar tiga tahun. Meskipun Israel secara nominal menganut demokrasi parlementer, selama sejarah hampir 67 tahun negara sepihak tersebut telah terjadi periode hanya sekitar satu tahun (1966-1967) bahwa Israel tidak memerintah atas sejumlah besar warga Palestina melalui keputusan militer, memberikan mereka tanpa hak-hak sipil dan politik hanya karena mereka bukan orang Yahudi.

Sistem politik Israel menganut sistem Apartheid.

Israel tidak memiliki konstitusi, hanya seperangkat hukum dasar yang mengacu pada kesetaraan selama mengatur sebuah sistem yang secara eksplisit sesuai keinginan Yahudi. Menurut salah satu undang-undang, dilarang bagi partai politik atau kandidat untuk mempertanyakan status Israel sebagai negara Yahudi. Sebagai negara yang secara sistematis mempunyai hak istimewa warga Yahudi atas orang-orang non-Yahudi, yang direkayasa untuk mempertahankan mayoritas Yahudi. Israel lebih akurat digambarkan sebagai penganut *ethnocracy*, atau negara *apartheid*.

Tidak ada pihak Arab yang pernah menjadi bagian dari sebuah koalisi yang berkuasa.

Setelah pemilu 2013, tokoh sentris Yair Lapid secara jelas mengesampingkan pembentukan sebuah aliansi taktis dengan pihak Arab, mengatakan ia “tidak akan bergabung, sebuah pemblokiran mayoritas, dengan Haneen Zoabi” – sebuah referensi pada anggota parlemen Knesset perwakilan Palestina dari Balad.

Meningkatnya jumlah pemilih warga Palestina (Arab-Israel).

Terdapat 5.881.696 pemukim Israel (warga berusia di atas 18 tahun) yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan Knesset ke-20 Selasa kemarin. Sebanyak 4.017.235 orang memberikan suara mereka dari 5,8 juta yang berhak untuk memilih, demikian Ma'an News melaporkan. Jumlah tersebut mewakili 71,8 persen total pemilih dibandingkan dengan 67,8 persen pada pemilu terakhir pada tahun 2013.

Dalam pemilu Israel kali ini juga terdapat tanda-tanda peningkatan jumlah pemilih antara penduduk Arab-Israel terhadap pemilu sebelumnya. Salah satu faktor utama adalah keputusan parta-partai Arab bersatu dalam satu koalisi, yang terdiri dari Majelis Nasional Demokrat (Balad), Front Demokratik untuk Perdamaian dan Kesetaraan (Hadash), cabang selatan Gerakan Islam, dan Gerakan Arab Pembaruan (Ta'al), yang mengklaim partai pertama mewakili warga Palestina di wilayah pendudukan Israel.

Beberapa faksi Palestina mendesak pemboikotan pemilu Knesset.

Kelompok politik yang mendukung boikot pemilu termasuk Gerakan Islam cabang Utara, yang dipimpin Sheikh Raed Salah, dan gerakan Abn'a el-Balad, bersama dengan aktivis yang tidak terafiliasi juga juru kampanye mahasiswa. Sementara Gerakan Perlawanan Hamas menegaskan, pihaknya tidak membedakan antar partai-partai Israel dan menolak bergantung pada hasil pemilunya.

Fokus Kampanye kesengsaraan sosial ekonomi.

Kampanye pemilu Israel kali ini telah difokuskan pada kesengsaraan sosial-ekonomi di Israel, seperti biaya hidup yang tinggi. Bahkan, demonstrasi besar-besaran berlangsung 10 hari menjelang Pemilu Israel. Puluhan ribu demonstran pemukim Israel berunjuk rasa di Tel Aviv menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mendesak dilakukannya “perubahan”. Aksi protes gelar organisasi akar-rumpun *Million Hands*, yang melancarkan kampanye perjanjian perdamaian Israel-Palestina serta pembentukan Negara Palestina.

Masyarakat Israel menganggap, Netanyahu telah mengesampingkan perekonomian negara itu yang terpuruk, salah satunya soal harga perumahan yang naik, dan lebih mementingkan soal keamanan dalam negeri. Netanyahu disebut terlalu terobsesi dengan Iran dan nuklirnya.

Bangkitnya Partai Non-Zionis dengan meningkatnya perolehan suara.

Sejauh ini, catatan paling penting dari pemilu Israel kali ini adalah bangkitnya Partai Persatuan Arab, sebuah koalisi partai non-Zionis (kebanyakan warga Palestina), dan penurunan dukungan untuk partai ultra-nasionalis Yisrael Beiteinu yang dipimpin Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, kemungkinan terkait skandal korupsi besar.

Pada tahun 2013, pihak Arab dijamin memperoleh secara gabungan 11 kursi di Knesset. Kali ini, Partai Persatuan Arab menjadi partai terbesar ketiga dalam pemilihan Parlemen Israel ke-20 itu dengan mendapatkan 14 kursi pada perhitungan awal. Ironisnya, hukum menaikkan ambang masuk di Knesset menjadi 3,25% dari 2%, banyak pihak percaya peraturan baru itu dimaksudkan sebagai serangan terhadap partai Arab/Palestina/non-Zionis, mengakibatkan mereka menyatukan dalam sebuah koalisi bersama. Ada kemungkinan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, oposisi resmi di Knesset mendatang dapat terdiri dari partai-partai non-Zionis.

Pemilih Palestina khawatir tentang diskriminasi, pekerjaan, pendidikan.

Isu-isu utama yang dihadapi warga Palestina dari Israel kekhawatiran ekonomi (yaitu pengangguran dan penciptaan lapangan kerja), pendidikan, pembatasan perencanaan desa dan kota, penghancuran rumah (terutama di Negev), undang-undang rasis atau ultra-nasionalis, serta isu-isu lain yang berasal dari diskriminasi struktural yang dihadapi oleh non-Yahudi.

Saat malam menjelang penutupan pemungutan suara, rakyat Palestina, bergabung dengan beberapa pemukim Israel dan orang-orang asing, berbaris di dekat Abu Dis, Tepi Barat, dalam upaya untuk mengirim pesan menentang perluasan dan pembangunan permukiman ilegal Israel. Para demonstran bentrok dengan pasukan keamanan Israel, dan beberapa demonstran ditahan. Contoh pendekatan rasis pemerintah Israel terhadap warga Arab diwujudkan pada Oktober 2000, ketika polisi Israel menggunakan peluru tajam terhadap warga sipil tak bersenjata yang melakukan aksi solidaritas mereka dengan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Tiga belas warga Palestina, di antaranya dua belas adalah pemukim Israel, ditembak mati.

Komisi resmi, dipimpin Hakim Theodor Or, menyerukan dan menegaskan bahwa polisi menggunakan kekerasan “berlebihan” dan tidak dapat dibenarkan, menambahkan polisi melihat warga Arab di entitas Zionis itu sebagai “musuh”. Selama 18 tahun pertama keberadaan negara sepihak ‘Yahudi’ Israel (1948-1966), warga Palestina dari Israel diperintah melalui keputusan militer, tidak seperti warga Palestina di wilayah pendudukan. Meskipun mereka memiliki hak untuk memilih, warga Palestina dari Israel, yang membuat sekitar 20% dari total jumlah penduduk Israel (sekitar 1,7 juta orang) mengalami diskriminasi di hampir setiap aspek kehidupan publik dan swasta, mulai dari kepemilikan tanah dan reunifikasi hak keluarga, kesempatan kerja dan akses mendapatkan pendidikan tinggi.

Anggota Knesset dari Palestina Haneen Zoabi awalnya didiskualifikasi.

Pusat Komite Pemilihan Israel memilih untuk melarang dua kandidat: Haneen Zoabi – dengan 27 suara menjadi enam suara – dan sayap kanan Yahudi nasionalis Baruch Marzel – dengan 17 suara menjadi 16 suara. Kedua keputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, meskipun pelarangan Zoabi didukung

sebagian besar kandidat – termasuk pemimpin partai kiri Zionis Union, Isaac Herzog. Di bawah hukum Israel, kandidat atau partai dilarang ikut pemilihan, antara lain, jika meniadakan keberadaan Israel sebagai ‘negara Yahudi’.

Aturan Knesset membatasi kemampuan Anggota Knesset asal Palestina untuk menantang diskriminasi struktural.

Knesset mengatur prosedur RUU yang diusulkan dapat melemahkan eksistensi Israel sebagai negara bangsa Yahudi – sebagai lawan semua warganya – akan ditolak.

Anggota Knesset asal Palestina sering menjadi sasaran penganiayaan politik.

Setelah di Knesset, Anggota Knesset asal Palestina sering menjadi sasaran penganiayaan bermotivasi politik. Di masa lalu, penganiayaan politik ini sudah termasuk penghentian dari Knesset, investigasi untuk mengunjungi sebuah ‘negara musuh’, dan penuntutan pidana berdasarkan tuduhan palsu. Lebih luas lagi, Shin Bet dalam catatan menyatakan upaya itu untuk menggagalkan kegiatan kelompok-kelompok yang berusaha merongrong karakter Yahudi Israel. Sementara pada tahun 2008, Mantan Kepala Badan Keamanan Internal Yuval Diskin, mengatakan kepada para pejabat Amerika Serikat (AS) bahwa banyak “penduduk Arab-Israel” mengambil hak-hak mereka “terlalu jauh.”

Partai Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara mengejutkan menang jauh dalam pemilu parlemen di Israel. Netanyahu akan mempertahankan politik konfrontasinya terhadap Palestina dan Amerika Serikat. Partai Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara mengejutkan menang jauh dalam pemilu parlemen di Israel. Netanyahu akan mempertahankan politik konfrontasinya terhadap Palestina dan Amerika Serikat.

Setelah lebih 99 persen suara dihitung sampai hari Rabu 18 maret 2015, Partai Likud tampaknya akan merebut 30 kursi dari seluruhnya 120 kursi di parlemen Israel, Knesset. Padahal sebelumnya berbagai jajak pendapat memperkirakan persaingan ketat. Namun kubu oposisi Uni Zionis hanya mampu mengumpulkan 24 kursi. Tokoh oposisi dan pimpinan Uni Zionis Isaac Herzog mengatakan, ia telah menelpon Netanyahu dan memberi selamat untuk pretasinya".

Politik konfrontasi

Menurut kantor berita Reuters, Partai Likud menyatakan bahwa Netanyahu akan segera melakukan perundingan koalisi untuk membentuk pemerintahan koalisi baru dengan kelompok-kelompok konservatif kanan dan kelompok agama. Menurut Netanyahu bahwa "Warga Israel mengharapkan kita untuk cepat membentuk kepemimpinan yang akan bekerja untuk rakyat memperbaiki keamanan, ekonomi, dan membangun masyarakat seperti yang kita inginkan. Dan kami akan melakukannya,"

Kemenangan telak Partai Likud cukup mengejutkan, karena sebelumnya berbagai jajak pendapat memperkirakan persaingan ketat Netanyahu dengan kubu oposisi pimpinan Isaac Herzog. Bahkan kubu Uni Zionis dalam jajak pendapat sempat diperkirakan unggul dengan 26 kursi, dan kubu Netanyahu dan Partai Likud diperkirakan hanya memboyong 20-22 kursi. Namun Netanyahu ternyata menang telak dan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Israel.⁵²

Pergeseran kekuasaan yang terjadi di Israel diprediksi urung terjadi. Netanyahu pun kembali berkuasa. Hasil pemilu kali ini bukan kabar baik buat Israel dan Timur Tengah. Benjamin Netanyahu memutar nasib. Di menit-menit terakhir sang perdana menteri mampu merebut balik pemilih berhaluan kanan dan menyusul ketertinggalan yang diprediksi dalam jajak pendapat.

Padahal jelang tengah malam pesaingnya Herzog dan bekas Menteri Luar Negeri Tzipi Livni masih merayakan kemenangan. Tapi kemudian situasi berbalik. Netanyahu sukses memangkas perbedaan suara. Jelang berakhirnya masa kampanye, Netanyahu yang nyaris diliputi panik menyusul hasil jajak pendapat, tidak jengah menggunakan trik-trik kotor dan melanggar Undang-undang Pemilu Israel. Dalam jumpa pers di hari pemungutan suara, sang perdana menteri misalnya mewanti-wanti bahwa "warga Arab" akan berbondong-bondong membanjiri tempat pemungutan suara untuk menggagalkan kemenangannya.

⁵² <http://www.dw.com/id/netanyahu-dan-partai-likud-menang-pemilu-di-israel/a-18322145>, diakses 15 November 2015 pukul 6.28

Walaupun kampanye di hari pemungutan dilarang dan sebabnya hasil jumpa pers tersebut tidak dipublikasikan di media-media nasional, pesannya dengan cepat menyebar ke publik umum. Bisa jadi kalimatnya itu akhirnya mendorong pemilih mengambang untuk mencoblos Partai Likud. Karena gambaran bahwa warga Palestina berpaspor Israel akan ikut menentukan arah kebijakan politik di sebuah "negara Yahudi" adalah hal yang tidak bisa dibayangkan oleh mayoritas penduduk Israel.

Memang kenyataannya keikutsertaan pemilu di kalangan minoritas Palestina di Israel, yang berjumlah 20 persen dan mewakili 14 persen pemilih, sangat tinggi. Suara merekalah yang membuat partai Arab, United Arab List, mampu merebut 14 kursi dan menjadi fraksi ketiga terkuat di Knesset. Kemenangan United Arab List adalah sebuah pencapaian besar yang sayangnya tidak akan menggeser Israel dari jerat ideologi ultranasionalis, yang menolak persamaan hak untuk minoritas Palestina di Israel atau warga Palestina di wilayah yang diduduki.

Isolasi Terhadap Israel

Hasil pemilu ini semakin membetoni isolasi internasional terhadap Israel. Pemilih akhirnya memutuskan buat melanjutkan kebijakan lama yang mengarah pada jalan buntu dan gagal memberikan jawaban atas masalah fundamental di Israel dan kawasan. Ia akan mengupayakan segala hal buat mencegah terbentuknya sebuah negara Palestina, kata Netanyahu sesaat jelang pemungutan suara. Pernyataan lantang yang melecehkan dunia internasional itu boleh jadi membantu kemenangannya di detik-detik terakhir. Tapi Netanyahu tidak menjelaskan bagaimana ia melihat masa depan di Timur Tengah.

Ironisnya pertanyaan itu tidak pernah diajukan oleh para pemilih. Mayoritas penduduk Israel rupanya masih siap dan bertekad untuk terus menjajah bangsa lain dan merenggut hak buat menentukan nasib sendiri milik warga Palestina di wilayah yang diduduki. Dengan kata lain, akhir pendudukan Israel bahkan setelah hampir lima puluh tahun, belum akan terjadi. Buat demokrasi di Israel dan masa depan penduduk di kawasan, hasil pemilu ini jelas bukan pesan yang baik.

Para pemimpin Palestina menyerukan tekanan internasional terhadap Israel setelah kemenangan Partai Likud, yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka meminta dunia bersatu membantu Palestina bergerak menjadi sebuah negara. Kemenangan mengejutkan Bibi, panggilan Netanyahu, merisaukan warga Palestina. Sebab, pada hari-hari terakhir kampanye, Bibi berjanji tidak akan ada negara Palestina selama ia berkuasa. Hal tersebut membuat prospek untuk solusi negosiasi konflik Palestina selama puluhan tahun menjadi suram.

"Jelas Israel telah memilih untuk mengubur proses perdamaian," kata Saeb Erekat,⁵³ Para pemimpin Palestina mengatakan kemenangan Likud berarti mereka harus maju dengan langkah-langkah sepihak menuju kemerdekaan, termasuk biaya pengajuan melawan Israel di Mahkamah Pidana Internasional.

Erekat dalam sebuah pernyataan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya Palestina menyebutkan, "Internasionalisasi perjuangan kami untuk martabat dan kebebasan melalui Pengadilan Kriminal Internasional dan cara damai lainnya." Prinsip Netanyahu untuk meniadakan negara Palestina mengancam rusaknya hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa, yang menentang sikap itu. Parlemen beberapa negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, telah meminta pemerintahnya untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka pada tahun lalu.

Sikap tersebut mencerminkan kekesalan negara-negara Eropa terhadap pembangunan permukiman oleh Israel secara terus-menerus di tanah yang diduduki Palestina. Swedia secara resmi mengakui Palestina pada Oktober 2014.⁵⁴

Sebelum Benjamin Netanyahu berkuasa pada 1996, Partai Likud sudah tiga kali kalah dalam pemilu. Kemenangan Likud waktu itu menggunakan cara-cara partai sayap kanan dengan menjual gagasan nasionalisme : tanah Israel hanya untuk bangsa Yahudi. Likud waktu itu menuduh Partai Buruh yang membuat

⁵³ kepala negosiator Palestina untuk perundingan dengan Israel, seperti dilaporkan *Voice of Palestine Radio* yang dilansir *Reuters* pada 18 Maret 2015.

⁵⁴ Kemenangan Partai Likud, Petaka Buat Israel Dan Palestina oleh Bettina Marx <http://sp.beritasatu.com/home/kemenangan-partai-likud-petaka-buat-israel-dan-palestina/81701>, diakses minggu 15 November 2015, pukul 16.10

bangsa Palestina masuk ke tanah Israel. Sikap keras Netanyahu sudah terlihat dalam karir politiknya. Ketika Perdana Menteri Yitzhak Rabin dari Partai Buruh sedang menguasai perdamaian dengan bangsa Palestina, Netanyahu memperlihatkan perangai buruknya.

Kejadian tahun 1993 itu Netanyahu bersama politikus Likud memprotes tindakan Partai Buruh. Mereka menuju Jericho dan menancapkan bendera-bendera Israel di sebuah rumah yang diduga akan dijadikan kantor Yasser Arafat. Di hadapan media Netanyahu memberikan ancamannya. "Kami akan tetap menyetop proses yang menyakitkan ini dengan cara-cara yang sah demi masa depan Israel. Kami akan melakukannya di Knesset dan di jalan-jalan."

Bibi begitu biasa dipanggil dibesarkan dalam keluarga kaya. Seperti Sharon, kariernya juga mencuat. Ayahnya, Professor Benzion Netanyahu, adalah diplomat. Amerika Serikat menjadi tempat Bibi menghabiskan masa sekolah lanjutan atasnya. Tahun 1967 ia kembali ke Israel untuk menjalani wajib militer dan keluar dengan pangkat kapten. Pengalaman perangnya Yom Kippur pernah dicicipi. Keluar dari tentara ia masuk Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Keahliannya dalam bidang manajemen dimanfaatkan dengan bekerja di Boston Consulting Group, sebuah konsultan kelas dunia.

Sebagai seseorang yang pernah beberapa kali dan kembali menduduki jabatan Perdana Menteri Israel, ternyata sepak terjang Benjamin Netanyahu menorehkan kepahitan bagi rakyat Palestina. Ada pun di bawah ini diantaranya empat bentuk kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang menghambat proses perdamaian dan menghapus harapan rakyat Palestina agar segera memiliki negara yang merdeka, yaitu :

Mengubah Kesepakatan Oslo

September 1996 pekikan Allahu Akbar bergema dari menara mesjid sebabnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan wali kota Jerusalem Ehud Olmert membuka terowongan di lereng kaki sebelah barat Masjid Al Aqsha. Hasilnya puluhan warga Palestina yang memprotes tindakan Israel tewas ditembak pasukan Netanyahu. Sebenarnya tujuan pembukaan terowongan

Mesjid Al Aqsha untuk memancing kemarahan warga Palestina dan melakukan kontak senjata langsung dengan polisi Palestina. Kerusuhan yang terjadi membuat pasukan Israel mempunyai alasan agar polisi Palestina dilucuti

Pendudukan Dataran Tinggi Golan

Netanyahu membuat undang-undang yang memperkuat penguasaan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan. Dataran tinggi itu adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak Perang Arab-Israel 1967. Isi undang-undang itu antara lain memerintahkan setiap upaya mengusir keberadaan Israel dari Golan harus mendapat persetujuan dari mayoritas anggota Knesset atau 80 dari 120 anggota. Kecaman datang dari seluruh dunia termasuk Partai Buruh Israel. Dengan adanya undang-undang itu perundingan dengan Suriah semakin macet. Bukan itu saja, Netanyahu tidak mematuhi perjanjian damai. Dia hanya menarik sembilan persen jumlah pasukan Israel di Tepi Barat Sungai Yordan. Padahal perjanjian menyebutkan Ierael harus menarik 30 persen tiap tahap sampai Agustus 1998 seluruh wilayah itu bebas tentara Israel.

Pembajakan Kapal

Dua operasi besar pernah dilakukan pasukan Netanyahu ketika mengamankan embargo Gaza. Pasukan Israel benar-benar melarang kapal-kapal asing yang membawa bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2013 pasukan Israel sampai membajak kapal MV Rachel Corrie berbendera Irlandia. Kapal itu merupakan kapal ketujuh Armada Kebebasan yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.

Israel beralasan diizinkan menyerbu kapal itu. Alasannya Hukum internasional mengizinkan Israel menghentikan kapal-kapal yang menuju Gaza sekalipun tengah berada di wilayah perairan internasional, yaitu Pasal 67 Manual San Remo pada Aplikasi Hukum Internasional untuk Konflik Bersenjata di Laut, 12 Juni 1994. Hasilnya sembilan tewas, 50 orang terluka. Lain waktu tahun 2013 kapal Mavi Marmara yang membawa rombongan misi kemanusiaan Freedom Flotilla diserbu juga menewaskan sembilan warga Turki.

Perang Gaza

Puncak kekerasan kepemimpinan Netanyahu ketika memerintahkan pasukan Israel menyerbu Gaza. Perang yang berlangsung medio Juli hingga Agustus 2014 itu terjadi dengan alasan mencari kelompok Hamas. "Saya meminta warga di Gaza keluar dari daerah yang menjadi lokasi teroris Hamas. Semua orang di lokasi ini akan menjadi target kami," ujar Perdana Menteri kelahiran Tel Aviv itu kepada media. Sebanyak 2.100 warga Palestina tewas akibat agresi Netanyahu itu.⁵⁵

Setelah pemilu Knesset berada di pusat perputaran politik Israel. Knesset adalah parlemen Israel. Sebanyak 120 kursi—yang diperebutkan dalam pemilu 17 Maret—terbadi oleh beragam partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Jabatan paling penting adalah perdana menteri, namun kursi perdana menteri akan tergantung sepenuhnya dari dukungan anggota Knesset. Konsekuensinya, rakyat Israel tidak memilih politisi tertentu, tapi partai politik, dan pemimpin partai yang memiliki kesempatan untuk menjadi perdana menteri berikutnya.

Bahkan pihak yang paling sukses sekalipun tidak akan cukup untuk memenangkan mayoritas kursi Knesset, karena ada beberapa pihak yang berkompetisi, pihak yang paling populer akan memenangkan tidak lebih dari 25 kursi, kurang dari seperempat dari Knesset.

Setiap partai politik akan bertemu dengan presiden satu hari setelah pemilu untuk memberi masukan siapa yang mereka inginkan jadi perdana menteri. Presiden lalu akan mengundang orang yang ditunjuk untuk membangun pemerintahan koalisi.

Di tahap ini, partai politik akan bernegosiasi, termasuk menawar siapa yang akan menduduki jabatan paling penting di kabinet Israel: menteri pertahanan, menteri keuangan dan luar negeri. Partai yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu belum tentu akan menjadi Perdana Menteri berikutnya.

⁵⁵ <http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/19/115651182/4-jejak-kekejaman-netanyahu-untuk-palestina>, diakses 15 November 2015, pukul 16.21

Hal ini sepenuhnya tergantung pada kemampuan sang politisi untuk membuat penawaran tepat untuk membangun koalisi. Ini pernah terjadi pada 2009, ketika Partai Kadima Tzipi Livni memenangkan kursi terbanyak, tapi dia tidak bisa membentuk koalisi. Sebaliknya, Benjamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri karena ia memiliki dukungan Knesset. Secara teknis, 61 kursi cukup untuk menjadi mayoritas di Knesset, tetapi perdana menteri umumnya menginginkan setidaknya 65 atau 66 kursi. Selain mendapat dukungan lebih besar, itu akan membuat mereka menjalankan pemerintahan dengan lebih aman karena akan mengizinkan si perdana menteri untuk menekan setiap pergolakan politik di Knesset.

Seringkali dalam politik Israel, satu atau dua partai kecil memegang sejumlah besar pengaruh. Partai-partai ini memutuskan siapa yang akan membuat pemerintahan koalisi. Dukungan mereka memungkinkan calon Perdana Menteri untuk mendapat dukungan dari mayoritas anggota Knesset. Ketika situasi ini terjadi, pihak ini disebut sebagai "kingmakers." Dukungan mereka memutuskan siapa yang menjadi perdana menteri.

Pemilihan Knesset seharusnya berlangsung setiap empat tahun, dan pemilu sebelum ini terjadi pada 2013 lalu. Namun undang-undang Israel mengatur bahwa parlemen akan bisa melakukan pemungutan suara dan menentukan kapan pemilu akan dilangsungkan.

Benjamin Netanyahu menyerukan pemilu dilakukan lebih awal, setelah ia memecat dua menteri senior anggota koalisinya karena mengkritik pemerintah. Pemungutan suara di Knesset pada Desember menyetujui usul Netanyahu tersebut. Awal Desember lalu, Netanyahu memecat Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni, pemimpin dua partai moderat yang bertentangan dengan kelompok sayap kanan yang mendominasi kabinet.

Menurut YM. Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi cepat atau lambat, berhasil atau tidaknya suatu perundingan damai semua tergantung kepada keinginan baik kedua belah pihak. Hasil kesepakatan yang telah disepakati dan seharusnya segera dilaksanakan, Namun pada kenyataannya seringkali hasil kesepakatan dilanggar oleh pihak Israel, karena Israel menganggap hal tersebut

justru merugikannya ketika pada tahap implementasinya. Ada sisi positif dari setiap perjanjian damai yaitu meningkatkan pendekatan politik ketimbang bersikukuh melawan dengan perang yang justru akan berjatuhannya banyak korban baik dari anak-anak maupun wanita. Pendekatan politik melalui jalur diplomasi menjadi strategi dan kekuatan yang signifikan bagi Palestina, walaupun harus bersabar. Pelan tapi pasti perjuangan Palestina membuahkan hasil yaitu semakin meningkatnya dukungan dunia terhadap Palestina baik pada level regional, nasional bahkan internasional. Ini ditandai pada level regional yaitu rakyat Palestina semakin giat membangun negaranya dengan meningkatkan jaringan perdagangan dan ekonomi, membangun sekolah sampai universitas, memperbaiki infrastruktur yang hancur akibat serangan Israel, mengembangkan aspek pariwisata untuk mengunjungi Palestina yaitu turis mancanegara, membuat perusahaan penerbangan Palestine Airways, membuat kode nomor telepon internasional dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Palestina dapat membangun negaranya sebagaimana halnya negara-negara lain di dunia ini. Kemudian semakin banyak negara di dunia mengakui Palestina dan meningkatkan status Palestina di PBB sebagai negara pemantau non-anggota yang sebelumnya berstatus sebagai entitas pemantau. Palestina bersiap mengajukan permohonan sebagai anggota penuh dan telah mengantongi suara 138 negara. Ini bukti keberhasilan politik diplomasi pemimpin Palestina.

- **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terbentuknya Kebijakan Politik Israel**

Politik luar negeri suatu negara dirumuskan untuk kepentingan politik dalam negeri. Israel merupakan negara yang sangat memadukan antara kebijakan politik dalam negeri dengan politik luar negerinya, dengan menempatkan faktor keamanan dalam negeri sebagai kepentingan utamanya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya pragmatisme kebijakan politik Israel, yaitu :

1. Kondisi aktor utama pengambil kebijakan : Perdana Menteri memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan, di mana output kebijakan politik luar negeri suatu negara dihasilkan melalui suatu proses pengambilan keputusan politik luar.

negeri (*Foreign Policy Decision Making Process*), dalam hal ini PM Benyamin Netanyahu bersikeras meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina dan enggan melakukan langkah-langkah produktif guna berjalannya perundingan damai Israel dan Palestina.

Adapun mengenai kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan damai Israel-Palestina sehingga sulit diselesaikan adalah faktor internal Israel sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal adalah Palestina sering dijadikan isu politik di antara partai-partai politik di Israel. Kebijakan terhadap Palestina sering menjadi penyebab kalah atau menangnya suatu partai di Israel. Pembangunan pemukiman Yahudi selalu menjadi faktor penting bagi partai-partai yang berkuasa maupun partai-partai oposisi.

Ketakutan Israel pada Palestina di masa depan juga menjadi kendala bagi perdamaian Palestina Israel. Tepi Barat merupakan kawasan berbukit yang memudahkan Palestina melancarkan serangannya terhadap Israel di suatu waktu. Itu sebabnya, salah satu agenda Israel dalam perundingan perdamaian dengan Palestina adalah menuntut Palestina tidak boleh memiliki angkatan bersenjata dan perbatasannya diawasi oleh Israel, yang tentunya ditolak keras oleh Palestina. Faktor eksternal adalah dukungan tanpa batas AS terhadap Israel. AS bukan hanya memberi dukungan politik yang kuat pada Israel, tapi juga memasok peralatan perang canggih ke Israel serta memberi bantuan ekonomi yang cukup besar pada negara kecil itu, yaitu US\$ 5 milyar, malah mungkin lebih, setiap tahun. Dukungan tanpa batas AS ini membuat Israel merasa aman dengan sikap kerasnya terhadap Arab. Lalu, dukungan kuat negara-Negara Timur Tengah, Organisasi Konferensi Islam, dan Gerakan Non-Blok kepada Palestina. Mereka menuntut Israel memerdekakan Palestina dengan batas negara Palestina sebelum perang 1967, yang ditolak Israel karena itu berarti Israel akan kehilangan Yerusalem Timur dan ratusan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang menempati cukup besar wilayah Palestina.

Negara-negara Timur Tengah yang secara resmi telah berdamai dengan Israel adalah Turki, Mesir, dan Yordania. Pada masa sebelum Februari 2011, Mesir banyak berperan dalam mengatasi konflik-konflik Israel dan Palestina. Selama

masa Arab Spring ini, di mana Mesir merupakan salah satu negara Arab yang mengalaminya, peran Mesir dalam proses hubungan Israel-Palestina agak berkurang. Tahun lalu, di era Ikhwanul Muslimin, Mesir memprakarsai gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Itulah satu-satunya keterlibatan Mesir dalam konflik Palestina Israel sejak jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011. Biasanya Mesir, negara Arab garda depan yang paling berpengaruh baik terhadap Israel maupun negara Arab lain, selalu hadir dalam mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Hubungan Israel dengan Yordania, yang menandatangani proses perdamaian dengan Israel pada 1994, adalah negara Arab yang paling dekat dengan Israel. Namun, perannya dalam proses perdamaian Israel Palestina tidak sebesar Mesir, juga tidak sebesar Arab Saudi dan kerajaan-kerajaan mini Arab di Teluk Persia, meskipun Yordania berbatasan langsung dengan Israel. Negara-negara inilah, bersama Mesir, yang memiliki pengaruh kuat pada AS dalam mendorong negara adidaya ini menekan Israel agar menyelesaikan konfliknya dengan Palestina. Turki merupakan negara besar di Timur Tengah, anggota NATO, yang sudah sejak awal Israel merdeka pada 1948 sudah berdamai dengan negara itu. Turki juga pernah menjajah Palestina selama ratusan tahun dan baru berakhir pada Perang Dunia I. Namun, peran negara ini dalam proses perdamaian Arab-Israel sangat kecil. Tapi belakangan ini, hubungan Israel dengan negara-negara Arab semakin dekat karena mereka menghadapi musuh bersama, yaitu Iran. Program nuklir Iran dan Arab Spring yang sedang melanda Suriah (negara Arab garda depan yang belum berdamai dengan Israel) dan peran Hizbullah pro-Iran di Lebanon (juga tetangga Israel) membuat kebutuhan Israel akan hubungan dengan negara-negara Arab semakin kuat. Ini karena baik Suriah maupun Hizbullah berada di bawah pengaruh Iran, musuh bebuyutan Israel. Negara-negara Arab Teluk yang tergabung dalam GCC (Dewan Kerja Sama Teluk) – yang terdiri dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait – sangat khawatir terhadap program nuklir Iran yang dicurigai berniat membuat bom nuklir walaupun Iran berkali-kali membantahnya dan menyatakan program nuklirnya bertujuan damai, yaitu untuk memasok listrik dalam negeri dan membuat riset kedokteran dan pertanian. Mereka bahkan mendorong AS

menyerang situs-situs nuklir Iran dengan biaya dari mereka sebagaimana yang dilaporkan Wikileaks. Sikap mereka ini juga yang menaikkan nyali Israel untuk menyerang Iran kalau dalam waktu dekat ini, Iran tidak menghentikan program nuklirnya. Saling membutuhkan antara Israel dan GCC+Mesir inilah yang membuat perdamaian Palestina-Israel, yang menjadi batu sandungan bagi perdamaian mereka, ingin diselesaikan segera. Negara-negara Arab ini, selain khawatir dengan program nuklir Iran, juga khawatir dengan pengaruh Iran yang semakin membesar di Timur Tengah. Sebagaimana kita ketahui, pengaruh Iran kini membentang dari Irak hingga Lebanon dan juga Hamas, yang kesemuanya merupakan musuh GCC, Mesir, Yordania, dan negara Arab lainnya. Persis sama dengan kekhawatiran Israel. Maka kini Israel menyadari konfliknya dengan Palestina mesti diselesaikan segera sehingga mereka bisa melakukan hubungan diplomatik yang terbuka dengan negara-negara Arab. Kalau hal ini terjadi, GCC dan Mesir bisa berharap pada Israel untuk menghentikan program nuklir Iran dan memotong tangan Iran di Timur Tengah.

Kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan damai Israel-Palestina sehingga sulit diselesaikan adalah faktor internal Israel sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal adalah Palestina sering dijadikan isu politik di antara partai-partai politik di Israel. Kebijakan terhadap Palestina sering menjadi penyebab kalah atau menangnya suatu partai di Israel. Pembangunan pemukiman Yahudi selalu menjadi faktor penting bagi partai-partai yang berkuasa maupun partai-partai oposisi. Ketakutan Israel pada Palestina di masa depan juga menjadi kendala bagi perdamaian Palestina Israel. Tepi Barat merupakan kawasan berbukit yang memudahkan Palestina melancarkan serangannya terhadap Israel di suatu waktu. Itu sebabnya, salah satu agenda Israel dalam perundingan perdamaian dengan Palestina adalah menuntut Palestina tidak boleh memiliki angkatan bersenjata dan perbatasannya diawasi oleh Israel, yang tentunya ditolak keras oleh Palestina. Faktor eksternal adalah dukungan tanpa batas AS terhadap Israel. AS bukan hanya memberi dukungan politik yang kuat pada Israel, tapi juga memasok peralatan perang canggih ke Israel serta member bantuan ekonomi yang cukup besar pada negara kecil itu, yaitu US\$ 5 milyar, malah mungkin lebih, setiap

tahun. Dukungan tanpa batas AS ini membuat Israel merasa aman dengan sikap kerasnya terhadap Arab. Lalu, dukungan kuat negara-negara Arab, Organisasi Konferensi Islam, dan Gerakan Non-Blok kepada Palestina. Mereka menuntut Israel memerdekakan Palestina dengan batas negara Palestina sebelum perang 1967, yang ditolak Israel karena itu berarti Israel akan kehilangan Yerusalem Timur dan ratusan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang menempati cukup besar wilayah Palestina.

Jelas, adanya kemerdekaan negara Palestina akan berdampak positif bagi rakyat Palestina dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Sekarang ini Palestina kehilangan akses ekonomi ke Israel. Sebelumnya, orang-orang Palestina menjadi buruh di Israel dengan upah yang lumayan tinggi. Tetapi sejak Israel membatasi buruh Palestina bekerja di Israel terkait dengan ancaman keamanan berupa serangan-serangan bom bunuh diri terhadap warga sipil Yahudi di Israel menyebabkan Israel mengurangi besar-besaran akses lapangan kerja Israel bagi Palestina. Sementara di Palestina sendiri, karena sedikitnya pembangunan terkait dengan kurangnya dana yang dipunyai, membuat Otoritas Palestina di Tepi Barat maupun Hamas yang mendominasi Jalur Gaza tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi buruh Palestina maupun kaum terpelajar tamatan perguruan tinggi. Dalam aspek politik pun Palestina akan mendapatkan keuntungan besar. Selama ini, karena masih berkonflik dengan Israel, Palestina agak terisolasi. Ia pun sulit menyalurkan aspirasi politiknya ke dunia luar akibat belum adanya kedutaan-kedutaan asing di Palestina maupun kedutaan-kedutaan Palestina di luar negeri. Hal ini berdampak pada kurangnya investor yang masuk ke wilayah Palestina karena ketiadaan informasi yang cukup, yang memaparkan peluang-peluang ekonomi yang potensial di Palestina. Aktivitas sosial pun tdk dapat berkembang maksimal karena kurangnya dana untuk membangun institusi-institusi sosial untuk melayani rakyat Palestina yang miskin. Kohesi sosial di antara rakyat Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza cukup kuat karena adanya kesamaan nasib buruk yang mereka alami selama puluhan tahun. Apabila Palestina telah berdaulat penuh, akan ada banyak investor Palestina di luar negeri yang kaya untuk menanamkan modalnya di Palestina. Mereka juga akan

berkontribusi bagi pembangunan Palestina di segala bidang, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Sebagaimana diketahui, tidak sedikit orang Palestina di diaspora yang berhasil mengembangkan bisnis mereka dan sebagian lagi menjadi akademisi

Peneliti sependapat dengan pendapat diatas yang dikemukakan oleh Bpk. Smith Al-Hadar mengenai kendala-kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perundingan sehingga seringkali mengalami kebuntuan. Di sisi lain yang patut dipertimbangkan adalah perbedaan pandangan antara Fatah dan Hamas. Dua partai politik yang saat ini berpengaruh besar pada dinamika politik Palestina. Fatah yang menguasai Tepi Barat gencar mengupayakan upaya diplomasi oleh Presiden Mahmoud Abbas, di sisi lain Hamas yang menguasai Jalur Gaza justru tidak mempercayai hasil perundingan tersebut. Namun pada perkembangan terkini ada sinyal positif dari Hamas yang mungkin menyetujui perundingan damai asalkan Israel segera menghentikan seluruh pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Pertentangan internal inilah yang justru melemahkan posisi tawar Palestina, malah justru menguntungkan posisi Israel sehingga perundingan seringkali memakan waktu berlarut-larut tanpa solusi nyata.

Menurut Peneliti, faktor dalam negeri Israel turut berperan dalam proses perundingan damai. Terdapat dua aliran utama di Israel yang saling bersaing dan bertentangan dalam memahami paham-paham zionisme, baik secara ideologis, pemikiran dan taktik pelaksanaan, yaitu :

- Partai Kanan Tengah Likud; cenderung kaku dan radikal dalam memahami paham-paham Zionisme, dimana tokoh Likud yaitu Menachem Begin dan Yitzhak Shamir menolak Resolusi 181 dan 242 karena mereka tetap berpegang teguh kepada visi Revisionis, yaitu klaim bahwa Israel Raya (Eretz Israel) yang membentang dari sungai Nil sampai Eufrat adalah hak bangsa Yahudi yang sudah digariskan Tuhan. Pemahaman inilah yang menjadikan Partai Likud cenderung kaku dalam menjalankan proses perundingan damai.
- Partai Kiri Tengah Buruh; lebih moderat dan pragmatis memahami paham-paham Zionisme, bersedia melepaskan tanah yang

berpenduduk mayoritas Arab, siap menerima jalan kompromi dengan Palestina – sekalipun tidak mereka tidak selalu mempraktikannya – dan menerima gagasan pembagian wilayah Palestina tahun 1947 serta rumusan tanah untuk perdamaian (*Land of Peace*) sebagaimana termuat dalam Resolusi 242.

- **Prospek Perdamaian Palestina-Israel pasca Pemilu 2015**

Israel terus mengalami ketakutan dan keresahan permanen. Meski sebagai unggul dan kuat, namun ia menjadi bangsa paling “paranoid” di dunia. Israel resah karena banyak hal yang berimbas kepada perilaku politiknya dalam banyak hal terutama soal konsekuensi perdamaian utuh. Israel takut jika koalisi strateginya dengan Amerika tidak bertahan lama atau dengan negara besar lain. Bisa jadi salah satu penopang eksistensi Israel adalah menjaga koalisi strategis dengan negara besar seperti Amerika. Karena itu Israel takut terhadap tekanan Amerika. Itulah alasan mengapa Israel takut kepada Obama meski ia sudah menegaskan jaminan keamanan terhadap Israel.

Di sinilah peran utama Lobi Israel, melihat semua perubahan kebijakan Amerika. Selalu membandingkan kekuatan Presiden Amerika dengan kekuatan oposisi yang menguasai Kongres. Untuk itulah Israel merasa nyaman dengan kemenangan partai Republik menguasai mayoritas kursi parlemen Amerika yang berwenang menentukan kebijakan keuangan dan peperangan Amerika. Faktor ini akhirnya bisa mendekatkan visi Amerika terkait persoalan permukiman Yahudi. Israel mengetahui bahwa perubahan politik demikian besar. Dan Amerika mempunyai visi keamanan yang tinggi sebagai Negara besar. Sementara Israel tidak boleh membahayakan kepentingan ini, sebab akan berdampak kepada eksistensi dan keamanannya.

Israel sangat takut terhadap berdirinya Negara Palestina, dan keputusan Dewan Keamanan PBB mendirikan Negara Palestina. Persoalan ini tidak sederhana. Ketakutan Israel terhadap perubahan kebijakan politik Amerika masih mendominasi. Namun pada kondisi kedua, Israel tidak mampu mencegah pembentukan Negara Palestina. Meski Amerika menggunakan hak Veto masih

memungkinkan untuk menghindar lewat UU Bersatu untuk Perdamaian. Dan menerbitkan kebijakan mengikat dari Majelis Umum.

Semua ini mempunyai dampak berbahaya bagi masa depan Israel. Israel bisa terkena embargo ekonomi atau non ekonomi. Inilah tafsiran mengapa Israel mengancam tindakan unilateral menentang pembentukan Negara Palestina. Yang menambah ketakutan Israel adalah empati Presiden Obama terhadap apa yang menimpa rakyat Palestina dan pengetahuannya bahwa mendirikan Negara merupakan solusi penting mengakhiri pertikaian Arab-Israel. Israel takut Negara Palestina berdiri, sebab akan berdampak kepada semua landasan berdirinya Israel, dan tidak ada seorang pun yang menjamin apa yang akan terjadi para Negara Palestina di masa mendatang.

Termasuk yang ditakuti Israel adalah perdamaian. Di antara dasar-dasar ilmu manajemen sengketa internasional adalah kekuatan dan perdamaian tidak bisa bertemu. Israel tahu bahwa perdamaian adalah melepaskan semua kategori kekuatan. Padahal ada banyak hal yang harus dilakukan dengan kekuatan sebagai otoritas penjajah. Antara lain mengakhiri penjajahan atas wilayah Palestina. Berintegrasi di tengah kepadatan penduduk Arab dan Islam, inilah ketakutan keempat Israel.

Ketakutan lain adalah, terungkapnya sikap Israel seputar demokrasi melalui UU yang dibuatnya yang berisi pemisahan nyata dari penduduk Arab. Inilah ketakutan-ketakutan Israel yang membentuk titik lemah.

Prospek akan adanya negara Palestina tak akan pernah terwujud, selama Benjamin Netanyahu masih memegang tampuk kekuasaan, perdana menteri Israel itu mengatakan pada Senin 16 maret 2015. Diberitakan **CNN**, dalam sebuah wawancara dengan media online Israel, NRG, Netanyahu membenarkan ketika ditanya apakah betul negara Palestina tidak akan berdiri selama ia menjabat menjadi perdana menteri.

Wawancaranya dengan NRG terjadi sehari sebelum pemilu Israel berlangsung pada hari Selasa 17 maret 2015. “Siapapun yang akan mendirikan negara Palestina, siapapun yang akan mengevakuasi teritori ini, hanya akan memberi pijakan bagi radikal Islam untuk melawan Israel. Ini adalah kenyataan.

yang sesungguhnya yang diciptakan di tempat ini dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Netanyahu. Netanyahu juga mengatakan kubu kiri bisa memberikan bantahan atas hal itu, atau mereka bisa “membenamkan kepala mereka ke dalam pasir.” Ia juga mengatakan bahwa pemerintahan kuat dari partai Likud-nya diperlukan untuk membalikkan tekanan dari dunia internasional yang ingin membagi Yerusalem dan mengembalikan perbatasan wilayah Israel seperti sebelum perang 1967. “Saya tidak menyerah,” kata Netanyahu. “Kami telah bertahan melawan banyak tekanan, dan kami akan terus bertahan.”

Menyusul wawancara Netanyahu, kepala negosiator Palestina Saeb Erekat, yang juga menjadi anggota komisi Palestine Liberation Organization, PLO, mengatakan bahwa tak ada yang baru dari ucapan Netanyahu. “Netanyahu sudah melakukan semua hal untuk mengubur solusi dua negara. Pernyataan Netanyahu di permukiman ilegal di Har Homa adalah respon dari pemerintahan yang mencoba memblokir inisiatif diplomatik Palestina. Ia tidak akan bisa melakukannya tanpa memperhitungkan impunitasnya di hadapan dunia internasional. Kini dunia harus belajar dan mengerti bahwa impunitas itu tak akan membawa kedamaian, hanya keadilan yang bisa,” ujar Erekat.

Sebelumnya, Netanyahu menggalang dukungan dengan berpidato di Har Homa, yang diklaim Netanyahu ia dirikan pada 1997, di periode pertamanya sebagai perdana menteri. Israel mengklaim Har Homa sebagai bagian dari wilayahnya, sementara Palestina menganggap permukiman itu ilegal. Jika ia terpilih kembali, Netanyahu mengatakan ia akan terus mempromosikan konstruksi di Yerusalem, sebagai alat bagi keamanan nasional.

“Tekanan terkait keputusan (pembangunan permukiman) sangat besar saat itu. Namun saya berkeras, saya memerintahkan konstruksi dan itu terbayar. Kini, Har Homa adalah lingkungan yang maju, dengan puluhan ribu warga sipil Israel tinggal di dalamnya. Seperti yang sudah kita buktikan di masa lalu, saya bersama partai Likud, kami akan terus menjaga Yerusalem dan terus mengembangkannya,” kata Netanyahu.

Pemimpin oposisi Isaac Herzog dan Tzipi Livni dari Zionist Union, dituding Netanyahu, “siap untuk menyerah pada dikte siapapun.” Netanyahu menuding Livni mencela pembangunan permukiman sementara Herzog ingin mendukung pembentukan negara Palestina di Yerusalem Timur.

“Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya dan rekan saya di Likud akan mempertahankan Yerusalem, dan kami akan membentenginya sehingga tidak akan mungkin untuk membagi Yerusalem dan Yerusalem akan tetap utuh. Kami akan terus mengembangkan ibu kota abadi kita,” lanjut Netanyahu. Netanyahu juga terus menekankan bahwa oposisinya mendapat dukungan dari dunia internasional.

Palestina harus konsisten menjaga platform bahwa perundingan perdamaian adalah jalan satu-satunya menuju kemerdekaan Palestina. Melawan Israel melalui jalan militer sangat tidak realistis dan Palestina akan kehilangan dukungan AS dan Uni Eropa. Sebagaimana diketahui, sejak Israel merdeka, AS dan Uni Eropa tidak mengakui perjuangan bersenjata Palestina. AS baru mengakuinya dan membantu financial Palestina hanya setelah terjadi perjanjian perdamaian sementara Israe-Palestina yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo. Almarhum Yasser Arafat yang selalu dituduh teroris oleh Israel dan AS baru diizinkan masuk AS setelah terjadi Kesepakatan Oslo itu. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana Palestina mampu berdiplomasi agar mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Hal ini sulit karena posisi tawar Israel dan Palestina tidak berimbang. Israel jauh lebih kuat dari Palestina sehingga Palestina, mau tidak mau, harus memberi konsesi signifikan kepada Israel sehingga memungkinkan Israel setuju memerdekakan Palestina. Konsesi-konsesi itu menyangkut Yerusalem Timur dan perbatasan kedua negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa Palestina harus bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat memperoleh seluruh wilayahnya sebelum perang 1967 karena sebagian besarnya sudah jadi ratusan permukiman Yahudi. Palestina juga harus member konsesi mengenai hak pulang warga Palestina. Tidak mungkin Israel setuju menerima sekitar 5 juta pengungsi Palestina pulang ke kampung halamannya di Israel.

Adanya kemerdekaan negara Palestina akan berdampak positif bagi rakyat Palestina dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Sekarang ini Palestina kehilangan akses ekonomi ke Israel. Sebelumnya, orang-orang Palestina menjadi buruh di Israel dengan upah yang lumayan tinggi. Tetapi sejak Israel membatasi buruh Palestina bekerja di Israel terkait dengan ancaman keamanan berupa serangan-serangan bom bunuh diri terhadap warga sipil Yahudi di Israel menyebabkan Israel mengurangi besar-besaran akses lapangan kerja Israel bagi Palestina. Sementara di Palestina sendiri, karena sedikitnya pembangunan terkait dengan kurangnya dana yang dipunyai, membuat Otoritas Palestina di Tepi Barat maupun Hamas yang mendominasi Jalur Gaza tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi buruh Palestina maupun kaum terpelajar tamatan perguruan tinggi. Dalam aspek politik pun Palestina akan mendapatkan keuntungan besar. Selama ini, karena masih berkonflik dengan Israel, Palestina agak terisolasi. Ia pun sulit menyalurkan aspirasi politiknya ke dunia luar akibat belum adanya kedutaan-kedutaan asing di Palestina maupun kedutaan-kedutaan Palestina di luar negeri. Hal ini berdampak pada kurangnya investor yang masuk ke wilayah Palestina karena ketiadaan informasi yang cukup, yang memaparkan peluang-peluang ekonomi yang potensial di Palestina. Aktivitas sosial pun tdk dapat berkembang maksimal karena kurangnya dana untuk membangun institusi-institusi sosial untuk melayani rakyat Palestina yang miskin. Kohesi sosial di antara rakyat Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza cukup kuat karena adanya kesamaan nasib buruk yang mereka alami selama puluhan tahun. Apabila Palestina telah berdaulat penuh, akan ada banyak investor Palestina di luar negeri yang kaya untuk menanamkan modalnya di Palestina. Mereka juga akan berkontribusi bagi pembangunan Palestina di segala bidang, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Sebagaimana diketahui, tidak sedikit orang Palestina di diaspora yang berhasil mengembangkan bisnis mereka dan sebagian lagi menjadi akademisi yang ternama, yang menguasai teknologi mutakhir. Mereka diharapkan akan pulang ke Palestina untuk membantu rakyat Palestina baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Prospek perdamaian di Timur Tengah khususnya penyelesaian konflik Israel-Palestina, nampaknya cenderung lambat menuju resolusi konflik. Namun demikian, adanya peran sejumlah negara-negara Arab untuk ikut memberikan pandangannya dalam penanganan masalah Israel-Palestina paling tidak dapat mempercepat de-eskalasi konflik di antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya Negara-negara Arab melalui Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Beirut pada tanggal 26-27 Maret 2002 telah menyetujui Proposal Damai Arab Saudi dalam rangka menciptakan keamanan di Timur Tengah sebagaimana yang tertuang dalam “Deklarasi Beirut”.⁵⁶ Selain itu, Negara-negara anggota Liga Arab telah menawarkan hubungan normal dengan Israel sebagai imbalan atas kesediaan Israel mundur dari seluruh tanah Arab yang diduduki pada tahun 1967, dengan menyerukan sebagai berikut :

1. Israel mundur dari seluruh tanah Arab hingga perbatasan 4 Juni 1967, termasuk Daratan Tinggi Golan dan sisa-sisa tanah di Lebanon Selatan.
2. Israel harus setuju solusi adil atas pengungsi Palestina sesuai dengan Resolusi no. 194;
3. Berdirinya Negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibukota Jerussalem, Resolusi PBB no. 1397.

Atas kesediaan Israel melaksanakan butir tersebut di atas, maka bangsa Arab menegaskan bahwa :

- a. konflik Arab-Israel telah berakhir dan memasuki penandatanganan kesepakatan untuk menetapkan hal tersebut.
- b. Menjalinkan hubungan normal dengan Israel dalam konteks perdamaian adil dan menyeluruh
- c. KTT Arab menyerukan pemerintah dan rakyat Israel menerima inisiatif perdamaian tersebut demi tidak menyia-nyiakannya serta menghindari pertumpahan darah, sehingga Arab dan Israel dapat hidup

⁵⁶ Lihat, “KTT di Beirut menghasilkan Deklarasi Beirut”, Kompas, 30 Maret 2002

berdampingan serta generasi mendatang bisa menikmati keamanan dan kesejahteraan.

Dilihat dari sejumlah tawaran tersebut di atas, setidaknya dapat menunjukkan good will Negara-negara Arab untuk tetap menjadi penyangga dalam menciptakan perdamaian di kawasan itu. Sejumlah Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengharapkan pasca KTT Arab dapat menjadi momentum bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan mendorong konflik Israel-Palestina dapat menghentikan pertikaian dan gencatan senjata serta mematuhi hukum internasional termasuk menghormati resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB.

Di tengah eskalasi konflik berdarah antara bangsa Palestina dan Israel. Tepatnya di gedung PBB tepatnya di New York telah melahirkan satu resolusi bernomor 1397 yang berisi pengakuan terhadap eksistensi Negara Palestina dan penuntutan dengan segera penghentian seluruh tindakan kekerasan, termasuk seluruh tindakan kekerasan, termasuk seluruh tindakan terror, provokasi, penghasutan dan perusakan

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dalam proses perdamaian Israel-Palestina terlihat jelas kebijakan politik Israel sangat mempengaruhi langkah-langkah proses perdamaian pasca Pemilu 2015. Hal ini juga dipengaruhi sikap aktor utama dalam perundingan yaitu PM Benyamin Netanyahu yang untuk ketiga kalinya terpilih sebagai Perdana Menteri Israel. Setelah ditelusuri ketika Benyamin Netanyahu memerintah setiap kebijakannya baik dalam dan luar negeri tidak ada itikad baik untuk memuluskan jalannya perdamaian. Hal ini secara nyata diungkap oleh Benyamin Netanyahu setiap ada kesempatan, seperti pada kampanye Pemilu maret 2015. Perdana Menteri memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan, di mana output kebijakan politik luar negeri suatu negara dihasilkan melalui suatu proses pengambilan keputusan politik luar negeri (*Foreign Policy Decision Making Process*), dalam hal ini PM Benyamin Netanyahu bersikeras meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina dan enggan melakukan langkah-langkah produktif guna berjalannya perundingan damai Israel dan Palestina.

2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kebijakan politik Israel, yaitu :

- Kondisi aktor utama pengambil kebijakan yaitu PM Benyamin Netanyahu. Partai Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara mengejutkan menang jauh dalam pemilu parlemen di Israel. Netanyahu akan mempertahankan politik konfrontasinya terhadap Palestina dan Amerika Serikat. Partai Likud dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara mengejutkan menang jauh dalam pemilu parlemen di Israel. Netanyahu akan mempertahankan politik konfrontasinya terhadap Palestina dan Amerika Serikat.

- Kondisi Politik dalam Negeri.

Israel bisa dimasukkan ke dalam kategori negara dengan sistem politik terbuka, dengan sejumlah ciri: adanya pemilihan reguler yang bersifat kompetitif, legalisasi dua atau lebih organisasi yang bertujuan menggantikan kepemimpinan

dalam pemerintahan, tingkat toleransi yang tinggi terhadap kelompok-kelompok otonom dalam politik, dan adanya kesepakatan terhadap aturan-aturan konstitusional bagi penguasa pemerintahan. Dalam negara demokrasi sistem terbuka yang stabil, *partisan influencers* memainkan peran terbatas dalam menyetujui atau menolak tindakan-tindakan politik luar negeri. Kasus ini tidak berlaku di Israel, sebab di Israel, *partisan influencers* memiliki peran besar untuk menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya di Knesset. Interest influencers di negara dengan sistem terbuka biasanya memainkan peran yang lebih besar. Coplin mencontohkan peran lobi Zionis di Amerika Serikat yang mampu mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Dalam sistem ini pula, iklim opini biasanya lebih terbebas dari manipulasi langsung para pengambil keputusan. Mass influencers dalam sistem terbuka memainkan peran penting dalam pemilu dan opini publik terhadap suatu kebijakan pemerintah.

- Tantangan Partai-Partai Politik

- Partai Kanan Tengah Likud; cenderung kaku dan radikal dalam memahami paham-paham Zionisme, dimana tokoh Likud yaitu Menachem Begin dan Yitzhak Shamir menolak Resolusi 181 dan 242 karena mereka tetap berpegang teguh kepada visi Revisionis, yaitu klaim bahwa Israel Raya (Eretz Israel) yang membentang dari sungai Nil sampai Eufrat adalah hak bangsa Yahudi yang sudah digariskan Tuhan. Pemahaman inilah yang menjadikan Partai Likud cenderung kaku dalam menjalankan proses perundingan damai.
- Partai Kiri Tengah Buruh; lebih moderat dan pragmatis memahami paham-paham Zionisme, bersedia melepaskan tanah yang berpenduduk mayoritas Arab, siap menerima jalan kompromi dengan Palestina – sekalipun tidak mereka tidak selalu mempraktikannya – dan menerima gagasan pembagian wilayah Palestina tahun 1947 serta rumusan tanah untuk perdamaian (*Land of Peace*) sebagaimana termuat dalam Resolusi 242.

3. Prospek Perdamaian Palestina-Israel pasca Pemilu 2015.

Prospek akan adanya negara Palestina tak akan pernah terwujud, selama Benjamin Netanyahu masih memegang tampuk kekuasaan, perdana menteri Israel itu mengatakan pada Senin 16 maret 2015. Diberitakan **CNN**, dalam sebuah wawancara dengan media online Israel, NRG, Netanyahu membenarkan ketika ditanya apakah betul negara Palestina tidak akan berdiri selama ia menjabat menjadi perdana menteri. Israel sangat takut terhadap berdirinya Negara Palestina, dan keputusan Dewan Keamanan PBB mendirikan Negara Palestina. Persoalan ini tidak sederhana. Ketakutan Israel terhadap perubahan kebijakan politik Amerika masih mendominasi. Namun pada kondisi kedua, Israel tidak mampu mencegah pembentukan Negara Palestina. Meski Amerika menggunakan hak Veto masih memungkinkan untuk menghindar lewat UU Bersatu untuk Perdamaian. Dan menerbitkan kebijakan mengikat dari Majelis Umum. Semua ini mempunyai dampak berbahaya bagi masa depan Israel. Israel bisa terkena embargo ekonomi atau non ekonomi. Inilah tafsiran mengapa Israel mengancam tindakan unilateral menentang pembentukan Negara Palestina. Yang menambah ketakutan Israel adalah empati Presiden Obama terhadap apa yang menimpa rakyat Palestina dan pengetahuannya bahwa mendirikan Negara merupakan solusi penting mengakhiri pertikaian Arab-Israel. Israel takut Negara Palestina berdiri, sebab akan berdampak kepada semua landasan berdirinya Israel, dan tidak ada seorang pun yang menjamin apa yang akan terjadi para Negara Palestina di masa mendatang. Termasuk yang ditakuti Israel adalah perdamaian. Di antara dasar-dasar ilmu manajemen sengketa internasional adalah kekuatan dan perdamaian tidak bisa bertemu. Israel tahu bahwa perdamaian adalah melepaskan semua kategori kekuatan. Padahal ada banyak hal yang harus dilakukan dengan kekuatan sebagai otoritas penjajah. Antara lain mengakhiri penjajahan atas wilayah Palestina.

Palestina harus konsisten menjaga platform bahwa perundingan perdamaian adalah jalan satu-satunya menuju kemerdekaan Palestina. Melawan Israel melalui jalan militer sangat tidak realistis dan Palestina akan kehilangan dukungan AS dan Uni Eropa. Sebagaimana diketahui, sejak Israel merdeka, AS dan Uni Eropa tidak mengakui perjuangan bersenjata Palestina. AS baru mengakuinya dan membantu

finansial Palestina hanya setelah terjadi perjanjian perdamaian sementara Israe-Palestina yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo. Almarhum Yasser Arafat yang selalu dituduh teroris oleh Israel dan AS baru diizinkan masuk AS setelah terjadi Kesepakatan Oslo itu. Yang jadi pertanyaan, sejauh mana Palestina mampu berdiplomasi agar mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Hal ini sulit karena posisi tawar Israel dan Palestina tidak berimbang. Israel jauh lebih kuat dari Palestina sehingga Palestina, mau tidak mau, harus memberi konsesi signifikan kepada Israel sehingga memungkinkan Israel setuju memerdekakan Palestina. Konsesi-konsesi itu menyangkut Yerusalem Timur dan perbatasan kedua negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa Palestina harus bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat memperoleh seluruh wilayahnya sebelum perang 1967 karena sebagian besarnya sudah jadi ratusan pemukiman Yahudi. Palestina juga harus member konsesi mengenai hak pulang warga Palestina. Tidak mungkin Israel setuju menerima asekitar 5 juta pengungsi Palestina pulang ke kampung halamannya di Israel.

B. Implikasi

- Mengikuti perkembangan proses perundingan damai konflik Israel-Palestina berarti ikut peduli dalam memberikan kontribusi pemikiran mengenai permasalahan di wilayah Timur Tengah.
- Dapat memberikan tekanan kepada Pemerintah Israel agar segera ada itikad baik untuk melanjutkan perundingan damai dengan Palestina dan mengakui kemerdekaan negara Palestina.
- Memberikan harapan dan optimisme kepada rakyat Palestian bahwa perjuangan mereka selalu mendapat dukungan dari dunia internasional.

C. Rekomendasi

- Persatuan dan kesatuan negara Islam seharusnya semakin ditingkatkan khususnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kekompakkan organisasi umat Islam seperti Liga Arab, OKI, OPEC dalam memainkan

posisi tawar mereka terhadap kebijakan luar negeri Israel dan Amerika Serikat.

- Pemerintah Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim agar mempertahankan sikap untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
- Dukungan dunia internasional sangat dibutuhkan untuk mendukung kemerdekaan negara Palestina dengan cara mengakui kedaulatan negara Palestina.
- Pemerintah Israel dan Palestina agar segera melanjutkan perundingan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Adian Husaini, *Pragmatisme dalam Politik Zionis Israel*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004

Ali Banuazizi and Myron Weiner, *The New Geopolitics of Central Asia and Its Borderlands*, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1994

David E. Long & Bernard Reich (Editor), *The Government and Politics of the Middle East and North Africa, USA*, Westview Press, 2002

Don Peretz & Gideon Doron, *The Government and Politics of Israel*, Colorado : Westview Press, 1997

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, PT Gramedi, 2003

Geoffrey Kemp and Robert E. Harkavy, *Strategic Geography and The Changing Middle East*, Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace in Cooperation with Brookings Institution Press, 1997

George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs (Timur Tengah di Tengah Kancuh Dunia)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1993

Coulombis, Theodore A. & Wolfe, James, *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, 3rd Editions, New Jersey, Prentice Hall, 1986

Cohen ,Raymond (1994) . *Journal Middle East Quarterly : Israel's Starry-Eyed Foreign Policy vol 2* . dikutip dari <http://www.meforum.org/221/Israels-starry-eyed-foreign-policy>

Don Peretz, *The Middle East Today*, (New York : Praeger Publisher, 1983

Don Peretz & Gideon Doron, *The Government and Politics of Israel*, Colorado : Westview Press, 1997

Halim Barakat, *The Arab World Society, Culture, and State*, California, University of California Press, 1993

Holsti, K. J., *International Politics, A Framework for Analysis*, 4th Edition, London, PrenticeHall, 1983

Iyad Hilal, *Palestina Akar-akar Masalah dan Solusinya*, Bogor : Pustaka Tariqul Izza, 2000

- Khalil Shikaki, *Peace Now or Hamas Later*, Jurnal Foreign Affairs, Agustus 1998
- Lloyd Jensen. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982
- Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Musthafa Abd.Rahman, *Lima Tahun Kesepakatan Oslo*, Kompas, 4 Mei 1999
- Pradana, Hafid Jurnal UMM *Fluktuasi Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina*, Malang
- Riza Sihbudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung : PT. Eresco, 1993
- Roger Graudy, *Israel dan Praktek-praktek Zionisme*, Bandung : Pustaka, 1988
- Rosenthal ,Yemima (2009).Journal Document of Israel Foreign Policy : *Volume 12The Sinai Campaign The Political Struggle, October 1956 – March 1957* Jerussalem
- Sandle,Smhuel *Israeli Coalition Politics and Foreign Policy* . BESA Center Perspectives Paper No. 211, August 19, 2013
- Snyder et.al. dalam Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press
- Telhamy, Shibley. 1990. *Israeli Foreign Policy: A Static Strategy in a Changing World*. Middle East Institute
- William D. Coplin, *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Terjemahan: M. Marbun), CV. Sinar Baru, Bandung,edisi kedua 2003
- ZA. Maulani, *Zionisme: Gerakan Menaklukan Dunia*, Jakarta : Daseta, 2002

<http://mirajnews.com/id/artikel/opini/pemilu-israel-dan-masa-depan-palestina/>, diakses pada 8 April 2015, pukul 1.42.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Knesset>, diakses pada 12 November 2015 pukul 12.10

<http://mirajnews.com/id/artikel/opini/pemilu-Israel-dan-masa-depan-palestina/>, diakses pada 8 April 2015, pukul 1.42.

<http://www.dw.com/id/netanyahu-dan-partai-likud-menang-pemilu-di-israel/a-18322145>, diakses 15 November 2015 pukul 6.28

Kemenangan Partai Likud, Petaka Buat Israel Dan Palestina oleh Bettina Marx

<http://sp.beritasatu.com/home/kemenangan-partai-likud-petaka-buat-israel-dan-palestina/81701>, diakses minggu 15 November 2015, pukul 16.10

<http://dunia.tempo.co/read/news/2015/03/19/115651182/4-jejak-kekejaman-netanyahu-untuk-palestina>, diakses 15 November 2015, pukul 16.21

Republika, 27 Februari 1994

Republika, 22 Februari 1995

Kompas, 5 Mei 1999

Kompas, 29 Juli 1999